

Upaya Diplomasi Pemerintah Amerika Serikat dalam Memerangi *Human Trafficking* di Thailand pada tahun 2013-2016

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Hubungan Internasional Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
dengan Minat Utama *Security and Conflict***

Universitas Brawijaya

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Oleh:

Melinda Yuliyani Medikawati

0911240067



**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2017

LEMBAR PERSETUJUAN

Upaya Diplomasi Pemerintah Amerika Serikat dalam Memerangi *Human Trafficking* di Thailand pada Tahun 2013-2016

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Melinda Yuliyani Medikawati

NIM. 0911240067

Telah disetujui oleh dosen pembimbing:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Mely Noviryani, S.Sos., MA
NIP. 2010048309092001

Yustika Citra Mahendra, S.Sos., M.A
NIK. 198408232015041001

Tanggal: 24 Januari 2017

Tanggal: 24 Januari 2017

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional

Dian Mutmainah, S.IP., M.A.

NIP. 197803192005012002

LEMBAR PENGESAHAN

Upaya Diplomasi Pemerintah Amerika Serikat dalam Memerangi *Human Trafficking* di Thailand pada Tahun 2013-2016

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Melinda Yuliyani Medikawati
NIM. 0911240067

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian sarjana

Pada tanggal 11 Januari 2017

Tim Penguji :

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Henny Rosalinda, S.IP., M.A
NIP.197908082014042001

Karina Putri Indrasari, B.A, M.A
NIK. 2016079009042001

Anggota Majelis Penguji I

Anggota Majelis Penguji II

Mely Noviryani, S.Sos., MA
NIP. 2011028002071001

Yustika Citra Mahendra, S.Sos., M.A
NIP. 198408232015041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE, M.Si., Ak.

NIP. 196908141994021001

LEMBAR ORISINALITAS

Nama: Melinda Yuliyon Medikawati

NIM: 0911240067

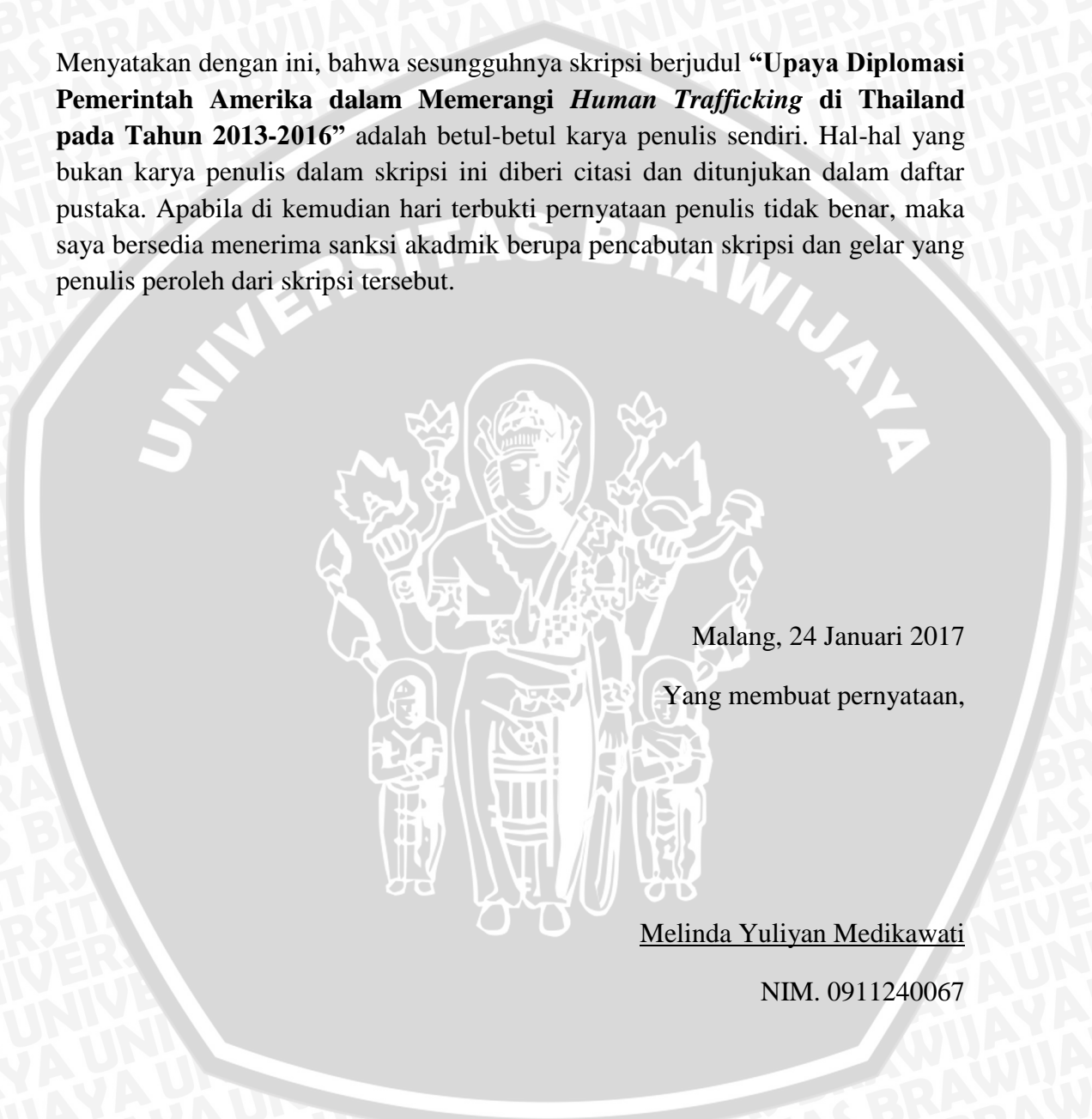
Menyatakan dengan ini, bahwa sesungguhnya skripsi berjudul **“Upaya Diplomasi Pemerintah Amerika dalam Memerangi *Human Trafficking* di Thailand pada Tahun 2013-2016”** adalah betul-betul karya penulis sendiri. Hal-hal yang bukan karya penulis dalam skripsi ini diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang penulis peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 24 Januari 2017

Yang membuat pernyataan,

Melinda Yuliyon Medikawati

NIM. 0911240067



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Upaya Diplomasi Pemerintah Amerika Serikat dalam Memerangi *Human Trafficking* di Thailand pada Tahun 2013-2016**”. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penulis menyadari bahwa, dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan penulisan selanjutnya.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangsih pemikiran, waktu, dan tenaga serta dukungan moril, kepada nama-nama berikut ini:

1. Kepada Allah SWT, yang sudah memberi berkat kesehatan, kemudaha, kelancaran dan kemampuan kepada penulis untuk terus dapat mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada Mama Yani dan Pap Fred yang telah memberikan dukungan baik moril, materiil dan doa selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta tidak ada habisnya memberikan memacu semangat penulis. *I cant Thank You Enough.*
3. Kepada Ibu Dian Mutmainah, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya.
4. Ibu Mely Noviryani, S.Sos., M.A selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Yustika Citra Mahendra, S.Sos, M.A selaku dosen pembimbing kedua yang telah

bersedia memberikan waktu, masukan, semangat, dan kesabaran untuk membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.

5. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Nyenyek Markinyek tersayang, Poppy, Pinky, Ovik, Okik, dan Soraya. Yang selalu memberikan dukungan dan semangat, kata-kata motivasi *without being judgy*. *I Love you guys, so much much much!* Lalu, untuk Yoga, terimakasih atas dukungannya, yang selalu ada disaat penulis membutuhkan bantuan, *you're the bestest friend that i've ever had. Thank you so much, Jes!* Tidak lupa juga Tika, Christine, Samid, Amiril, Naff, Rafi dan Steven atas dukungannya dan pengertiannya. *Thank you for always be there when I needed help.*
6. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Agta, Maya, Bagus Soekendro, Genes, Rifky, Yandi dan Puspita. Teman Kloter Terakhir seperjuangan yang selalu berbagi kebingungan dan kegundahan soal skripsi. Sukses selalu *guys!* Terimakasih juga untuk teman-teman Arisan dan juga teman-teman dari jurusan Hubungan Internasional 2009 lainnya yang juga telah membantu penulis dengan memberikan masukan-masukan dan dukungan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala bentuk sumbangsih dan dukungan yang telah diberikan hingga terselesaikannya tulisan skripsi ini.

Sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak baik yang telah membantu dalam segala proses penyelesaian skripsi ini Semoga Ridho Allah SWT, selalu bersama kalian. Untuk penutup semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya.

"Yesterday I was Clever, so I wanted to change the world.

Today I am wise, so I am Changing my self"

- Rumi

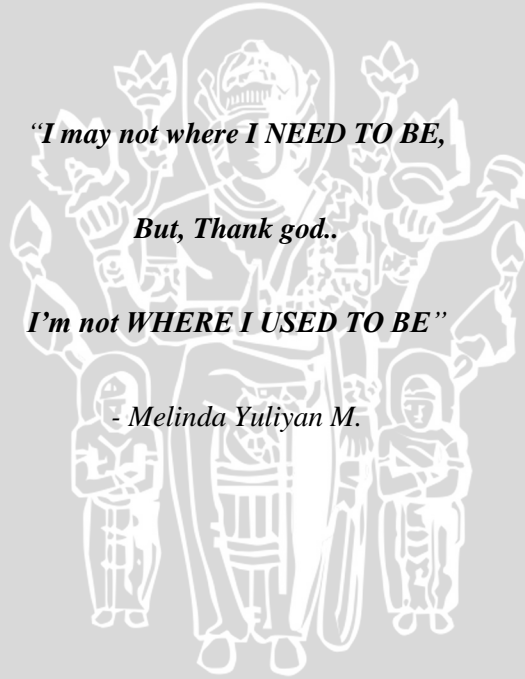
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

"I may not where I NEED TO BE,

But, Thank god..

I'm not WHERE I USED TO BE"

- Melinda Yuliyana M.



Malang, 24 Januari 2017

Penulis

Upaya Diplomasi Pemerintah Amerika Serikat dalam Memerangi *Human*

Trafficking di Thailand pada Tahun 2013-2016

Melinda Yuliyani Medikawati (0911240067)

ABSTRAKSI

Penelitian ini mengangkat tema tentang bagaimana upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam rangka memerangi *human trafficking* di Thailand pada tahun 2013-2016. Pemerintah Amerika Serikat merupakan salah satu negara besar yang sangat menentang akan adanya perdagangan manusia. Pemerintah Amerika Serikat menekankan berkali-kali bahwa perdagangan manusia merupakan suatu bentuk dari perbudakan modern yang harus diperangi. Dalam upayanya memerangi perdagangan manusia, pemerintah Amerika Serikat tidak hanya melakukannya dalam lingkup nasional, namun juga secara global. Berapa upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat secara global adalah membentuk *TIP Office*, pemberian nobel perdamaian dan mengundang para petinggi keagamaan diseluruh dunia untuk turut dalam memerangi perdagangan manusia yang ada. Setiap tahunnya pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan laporan tahunan *TIP Report* yang memantau bagaimana upaya pemerintah dunia dalam memerangi perdagangan manusia, dan juga melalui laporan tersebut pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan program-program guna memerangi perdagangan manusia.

Dalam pemberian dana bantuan dan program dalam hal memerangi perdagangan manusia, Thailand juga termasuk dari 190 negara tersebut yang dibantu oleh Amerika Serikat. Sebagai negara yang besar Thailand merupakan negara maju diantara negara-negara tetangga disekitarnya, sehingga Thailand merupakan negara tujuan bagi para pelaku perdagangan manusia untuk masuk dan melakukan perdagangan manusia. Selain itu Thailand juga menempati peringkat ke empat sebagai negara tujuan dari *human trafficking* di dunia. Dan dengan adanya hubungan diplomatik antara Thailand dan Amerika Serikat yang sudah terjalin selama lebih dari satu abad.

Maka dari itu merupakan suatu hal yang menarik apabila menganalisis bagaimana upaya diplomasi pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi *human trafficking* di Thailand dengan mengambil jangka waktu sejak tahun 2013-2016. Selain itu pula pada tahun 2016 terlihat adanya perubahan peringkat yang di raih oleh Thailand dari Tier 3 menjadi Tier 2 Watch List.

Keyword : Upaya Diplomasi, Pemerintah Amerika Serikat, Perdagangan Manusia, Thailand

The Government of United States Diplomatic Efforts Against Human Trafficking in Thailand in 2013-2016

Melinda Yuliyani Medikawati (0911240067)

ABSTRACT

This research's theme is about the diplomatic efforts undertaken by the Government of United States in order to combat human trafficking in Thailand in the year 2013-2016. The Government of United States is one of the major countries that strongly opposed the existence of human trafficking. The US government repeatedly stressed that human trafficking is a modern form of slavery that must be fought. In its efforts to combat human trafficking, the Government of United States not only do nationally, but also globally. Some of the diplomatic efforts undertaken by the government of the United States globally is forming TIP Office, Nobel Peace Award and invited the religious leaders around the world to participate in the fight against human trafficking. Each year the government of the United States issues an annual TIP Report that monitors how the efforts of governments around the world in the fight against human trafficking. Also through the report, the US government released programs to combat human trafficking.

In grants and programs in the fight against human trafficking, Thailand also includes 190 countries, assisted by the United States. Thailand is a big country among the developed neighboring countries, that makes Thailand a destination country for traffickers to enter and conduct human trafficking. Besides, Thailand also ranks fourth as a destination country of human trafficking in the world. And in the presence of diplomatic relations between Thailand and the United States that has existed for more than a century.

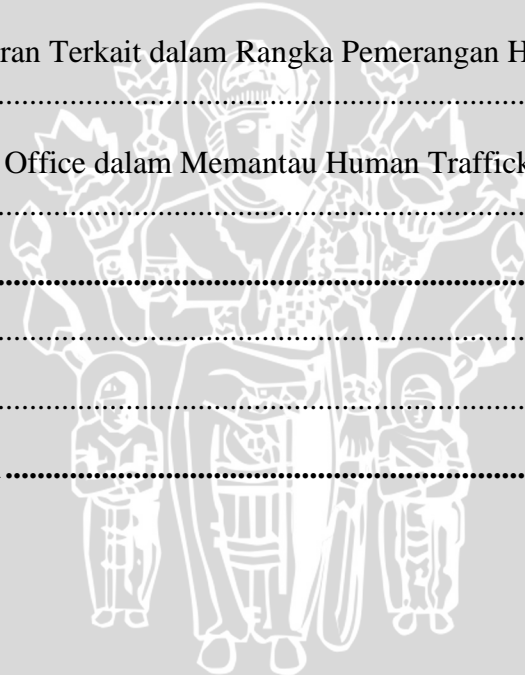
Thus it is an interesting matters to analyze on how the US government diplomatic efforts against human trafficking in Thailand by taking the period since 2013 to 2016. In addition, also in 2016 seen their ranking changes in achieved by Thailand from Tier 3 to Tier 2 Watch List.

Keyword : Diplomatic Efforts, The Government of The United States, Human Trafficking, Thailand

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II. KERANGKA PEMIKIRAN.....	14
2.1 Studi Terdahulu	14
2.2 Kerangka Konseptual	19
2.2.1 <i>Bilateral Diplomacy</i>	19
2.3 Operasionalisasi Konsep	21
2.4 Alur Pemikiran	28
2.5 Argumen Utama	28
BAB III. METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Ruang Lingkup	30
3.3 Teknik Pengambilan Data	30
3.4 Teknik Analisa Data	31
3.2 Sistematika Penulisan.....	31

BAB IV. GAMBARAN UMUM.....	33
4.1 <i>Human Trafficking</i> di Thailand	33
4.2 Keterkaitan <i>Human Trafficking</i> di Thailand terhadap Pemerintah Amerika	42
BAB V. UPAYA DIPLOMASI PEMERINTAH AMERIKA DALAM MEMERANGI HUMAN TRAFFICKING DI THAILAND PADA TAHUN 2013-2016	51
5.1 Pemberian Dana Bantuan dan Kerjasama Impor sebagai Upaya Diplomasi Pemerintah Amerika Serikat	54
5.2 Penggunaan NGO dan Media dalam upaya Diplomasi Pemerintah Amerika Serikat	61
a. NGO	62
b. Media Massa	66
5.3 Pembuatan Laporan Terkait dalam Rangka Pemerangan Human Trafficking	70
5.4 Penggunaan TIP Office dalam Memantau Human Trafficking di Thailand	83
BAB VI. PENUTUP	90
6.1 Kesimpulan	90
6.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Operasionalisasi konsep27

DAFTAR ISI..... ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

BAB II. KERANGKA PEMIKIRAN11

BAB III. METODE PENELITIAN.....29

BAB IV. GAMBARAN UMUM32

BAB V. UPAYA DIPLOMASI PEMERINTAH AMERIKA DALAM
MEMERANGI *HUMAN TRAFFICKING* DI THAILAND PADA TAHUN
2013-2016.....62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Presentase bentuk-bentuk eksploitasi yang diterima oleh korban *human trafficking* di Dunia2

Gambar 1.2 Religious leaders from around the world met to sign the historic Declaration of Religious Leaders against Modern Slavery.....5

Gambar 1.3 Grafik Peringkat Thailand dalam memerangi *human trafficking*.....10

Gambar 4.1 Grafik IOM Assistance to Trafficked Persons on 201136

Gambar 4.2 *Destinations of Trafficking Victims Originating in East Asia and The Pasific*38

Gambar 4.3 Grafik Data Impor *Shrimp* Amerika Serikat45

Gambar 4.3 Kondisi Kapal Thailand yang digunakan untuk mengangkut udang62

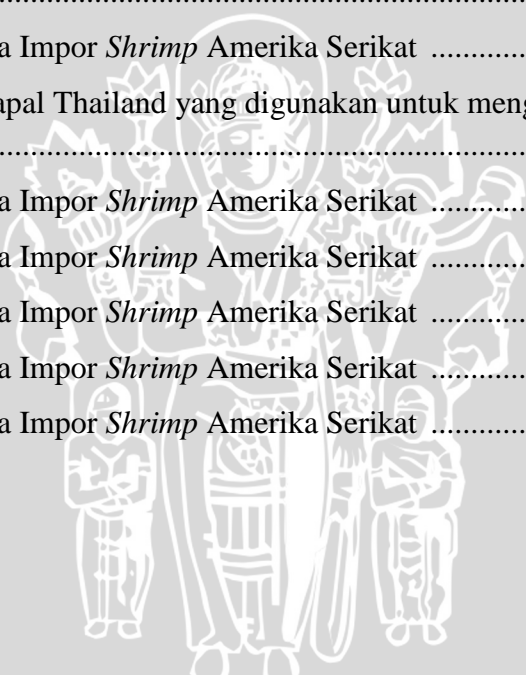
Gambar 4.3 Grafik Data Impor *Shrimp* Amerika Serikat45

Gambar 4.3 Grafik Data Impor *Shrimp* Amerika Serikat45

Gambar 4.3 Grafik Data Impor *Shrimp* Amerika Serikat45

Gambar 4.3 Grafik Data Impor *Shrimp* Amerika Serikat45

Gambar 4.3 Grafik Data Impor *Shrimp* Amerika Serikat45



BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

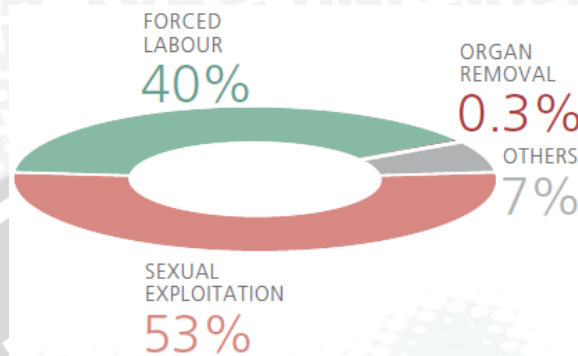
Amerika Serikat merupakan salah satu negara besar yang terdiri dari 50 negara bagian dan dengan luas 9.826.630 km² yang juga memiliki jumlah penduduk dengan total 318.892.103 juta jiwa.¹ Selain itu, Amerika Serikat juga rentan akan *human trafficking*, Amerika Serikat seringkali dijadikan sebagai negara tujuan para korban *human trafficking*. Pemerintah Amerika Serikat sadar akan hal itu dan mengupayakan segala hal guna memerangi *human trafficking*.

Berdasarkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, human trafficking* (perdagangan manusia) berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dan atau memberi, menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk eksploitasi untuk melacurkan orang lain,

¹ National Geographic Kids.-.Articles: *United States* diunduh dari <http://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/united-states/#united-states-golden-gate-bridge.jpg> pada 28 July 2016

mempekerjakan dan memperbudak orang lain secara paksa dan juga dapat berupa pengambilan organ tubuh orang lain.

Gambar 2.1 Presentase bentuk-bentuk eksploitasi yang diterima oleh korban *human trafficking* di Dunia



Sumber: *Global Report on Trafficking in Person 2014*²

Berdasarkan bagan diatas, dari beberapa bentuk dan jenis eksploitasi yang di alami oleh korban dari *human trafficking*, eksploitasi seksual memiliki jumlah presentase yang paling besar yaitu 53%, dan ekplotasi yang berujung pada *forced labour* sebesar 40%, dengan sisanya 0,3% merupakan eksploitasi penjualan organ, dan 7% eksploitasi lainnya. Dan yang mana dalam bagan tersebut menunjukan bahwa dua jenis perdagangan manusia yang paling besar dan sering ditemukan di dunia adalah *Forced Labour* dan *Sexual Exploitation* yang mana mengarah pada *Sex Trafficking*.

Dalam memerangi *human trafficking* pemerintah Amerika Serikat melakukan berbagai macam cara. Pada tahun 2000 pemerintah Amerika Serikat meratifikasi dan mengadopsi *the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention againts Transnational Organized Crime (the Parlemo*

² UNODC.2014.*Global Report on Trafficking in Person 2014* (United Nations publication, Sales No. E.14.V.10) hal. 37

Protocol).³ Selain itu Amerika Serikat juga membuat suatu undang-undang anti-trafficking yaitu *the Trafficking Victims Protection Act (TVPA)* yang merupakan undang-undang perlindungan terhadap korban *human trafficking* yang di buat pada tahun 2000. *TVPA* memiliki kebijakan 3P yaitu, *Prosecution, Protection, dan Prevention*.⁴

Tidak hanya memerangi *human trafficking* secara domestik saja, namun pemerintah Amerika Serikat menunjukkan komitmennya dengan memeranginya secara global. Pemerintah Amerika Serikat menekankan bahwa pemerangan perdagangan manusia merupakan suatu bentuk dari kebijakan luar negeri yang diutamakan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Maka dari itu guna menunjukkan komitmennya dalam menagani dan memerangi *human trafficking* secara global Pemerintah Amerika Serikat membentuk secara khusus sebuah kantor yang berada di bawah pemerintah Amerika Serikat yang bernama, *The Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons (TIP Office)*. *TIP Office* merupakan salah sebuah bentuk dari undang-undang anti-trafficking Amerika Serikat yaitu *TVPA*.⁵

TIP Office memiliki sebuah program anti-trafficking berskala internasional yang dimulai semenjak tahun 2001. Program tersebut memiliki dana lebih dari 250 juta US dollar yang digunakan untuk mendukung lebih dari 880 project anti-

³ Departement of State, USA.2016.*Trafficking in Person Report 2016* hal. 32

⁴ Diunduh dari <https://fightslaverynow.org/why-fight-there-are-27-million-reasons/the-law-and-trafficking/trafficking-victim-protection-act/trafficking-victim-protection-act/> pada 29 July 2016

⁵ Diunduh dari <http://m.state.gov/mc16465.htm>

trafficking secara mendunia.⁶ Yang mana setiap tahunnya mengeluarkan laporan tahunan yang berjudul *Trafficking in Persons Report*. Laporan tersebut berisikan mengenai bagaimana situasi dan kondisi serta upaya yang dilakukan suatu negara di dunia dalam memerangi *human trafficking*. *TIP Report* sendiri merupakan salah satu cara pemerintah Amerika Serikat menekankan akan pentingnya memerangi perdagangan manusia. Dalam setiap *TIP Report* yang dikeluarkan setiap tahunnya pemerintah Amerika Serikat menekankan akan pentingnya memerangi perdagangan manusia. Pada tahun 2014, John F. Kerry yang mana pada tahun itu adalah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan;

“...one absolutely inextricably linked to the broader effort to spread the rule of law and face the crisis of failed and failing states, we find perhaps no greater assault on basic freedom than the evil of human trafficking.”⁷

Dapat kita lihat bahwa dalam memerangi perdagangan manusia, pemerintah Amerika Serikat menganggap bahwa perdagangan manusia merupakan sebuah serangan yang fatal bagi suatu negara dibanding kejatuhan suatu negara. Ia juga menyatakan bahwa perdagangan manusia merupakan sebuah serangan bagi kebebasan dasar dan merupakan pelanggaran besar bagi hak asasi manusia. Perdagangan manusia juga merupakan sebuah ancaman yang mengancam segala kalangan, baik wanita, pria, anak-anak, orang dewasa, hingga orang tua.

Pemerintah Amerika Serikat menekankan berkali-kali bahwa perdagangan manusia merupakan suatu bentuk dari perbudakan modern yang harus diberantas. Selain itu, dalam setiap laporannya pemerintah Amerika juga menekankan bahwa

⁶ Ibid.

⁷ Departement of State, USA.2014.*Trafficking in Person Report 2014*

repository.ub.ac.id

suatu negara tidak dapat menangani perdagangan manusia itu sendirian. Karena perdagangan manusia merupakan suatu kejahatan yang melintasi batas yang mana diperlukan bekerjasama dengan negara lain.

Program dan laporan tersebut merupakan bentuk kepanjangan tangan dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mana merupakan salah satu bentuk dari diplomasi pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi *human trafficking*.⁸ Program tersebut diikuti oleh 190 negara yang tersebar di 5 benua di dunia. Yang mana program yang diberikan tersebut didukung dengan adanya pemberian dana bantuan guna memerangi perdagangan manusia. Dana tersebut dapat diajukan oleh para pemerintah dari 190 negara tersebut.

Gambar 1.2 Religious leaders from around the world met to sign the historic Declaration of Religious Leaders against Modern Slavery



Sumber: *Trafficking in Person Report 2015*⁹

Selain itu pula dalam memerangi perdagangan manusia, pemerintah Amerika Serikat menggandeng para pemuka Agama untuk menandatangani

⁸ Departement of State, USA.2013.*Trafficking in Person Report 2013* hal. 3

⁹ Departement of State, USA.2015.*Trafficking in Person Report 2015* hal. 10

Declaration of Religious Leaders against Modern Slavery. Yang mana pada 2 Desember 2014, pemerintah Amerika Serikat mengumpulkan pemimpin pemuka agama dari seluruh dunia dengan tujuan agar mereka dapat mengajak para pengikut mereka untuk turut serta dalam memerangi perdagangan manusia.¹⁰ Para pemimpin keagamaan tersebut juga sangat mendukung dengan adanya upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam rangka memerangi perdagangan manusia di seluruh dunia.

Salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat, yaitu pemberian nobel perdamaian kepada Kailash Satyarthi di tahun 2014.¹¹ Nobel tersebut diberikan dalam rangka peran Kailash Satyarthi dalam memerangi perdagangan manusia dalam hal pekerja anak-anak. Nobel tersebut diberikan oleh Presiden Amerika pada saat itu yaitu Barack Obama dan Ibu Negara Michelle Obama.

Dalam pemberian dana bantuan dan program dalam hal memerangi perdagangan manusia, Thailand juga termasuk dari 190 negara tersebut. Thailand dan Amerika Serikat memulai hubungan diplomatik mereka pada tahun 1832 dan ditandai dengan resmi dengan adanya penandatanganan perjanjian persahabatan dan perdagangan pada tahun 1833.¹² Namun pada tahun 2014, terjadi kudeta pemerintahan di Thailand oleh tentara Thailand yang membuat hubungan

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Departement of State, USA.-*Thailand-US Relations* diunduh dari <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2814.htm>

Thailand dan Amerika Serikat merenggang yang mana Amerika Serikat menyatakan kekecewaannya akan kudeta yang terjadi di Thailand.

Thailand merupakan sebuah kunci sekutu yang penting bagi Pemerintah Amerika Serikat dalam perannya di benua Asia.¹³ Sejak terjadinya perang dunia ke-2 Thailand merupakan sekutu Amerika Serikat dalam hal menjaga perdamaian, dan semenjak itu pula hubungan diplomatik diantara kedua negara tersebut berkembang dan merambah ke bidang keamanan dan hubungan dagang. Amerika Serikat dan Thailand juga menandatangani perjanjian Manila di tahun 1954 dan tergabung kedalam SEATO (*Southeast Asia Treaty Organization*).¹⁴ Walaupun terjadi pembubaran SEATO, Thailand dan Amerika Serikat tetap menjadi sekutu yang kuat dan pada tahun 2012 Thailand dan Amerika Serikat melakukan kerja sama keamanan dan pertahanan dimana Amerika Serikat mempunyai basis militer yang terletak di Thailand.¹⁵ Selain itu pula pada tahun 2003 Amerika Serikat menyatakan bahwa Thailand merupakan sekutu non-NATO yang sangat erat dengan Amerika Serikat.

Pada tahun 2014, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan laporan tahunan yang berjudul *Trafficking in Persons Report 2014* yang menjelaskan penurunan peringkat upaya pemerintah Thailand dalam penanganan *human trafficking* di Thailand.¹⁶ Dengan dikelilingi oleh negara-negara yang rentan akan konflik menjadikan Thailand sebagai negara tujuan *human trafficking*. Umumnya,

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Departement of State, USA.2014.*Trafficking in Person Report 2014* hal. 372

para korban *human trafficking* melakukan migrasi keluar dari negaranya guna mencari kehidupan yang lebih baik, mencari suaka, atau mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Mereka beranggapan, bahwa dengan melakukan migrasi mereka akan menemukan kehidupan dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Menurut laporan UNIAP, Thailand merupakan negara tujuan, pengirim serta negara transit bagi para korban *human trafficking* terbesar di asia tenggara.¹⁷

Bentuk dari *human trafficking* yang sering ditemui di Thailand adalah *forced labour* dan *commercial sexual exploitation (sex trafficking)*.¹⁸ Thailand juga merupakan negara pengirim dan penerima dalam hal *human trafficking*. Dalam laporan yang di keluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2014 menunjukkan bahwa bergabungnya Thailand kedalam Tier 3 bersama dengan 20 negara yang melakukan pelanggaran HAM dan tidak memerangi *human trafficking*.

Negara-negara tersebut ialah Korea Utara, Iran, Qatar, Arab Saudi, Rusia, dan lain sebagainya.¹⁹ Penurunan tersebut terjadi dikarenakan kurangnya upaya pemerintah Thailand dalam menanggapi *human trafficking*. Sebelumnya penurunan peringkat Thailand juga pernah terjadi di tahun 2010, dimana Thailand turun dari peringkat Tier 2 menjadi Tier 2 Watch List. Berdasarkan laporan tersebut yang dimaksud dengan Tier 2, adalah suatu kondisi dimana negara tidak sepenuhnya memenuhi aturan yang sesuai dengan *US Anti-Trafficking Laws*

¹⁷ UNIAP.2015.*Thailand Human Trafficking Datasheet* Hal. 1

¹⁸ Opcit.

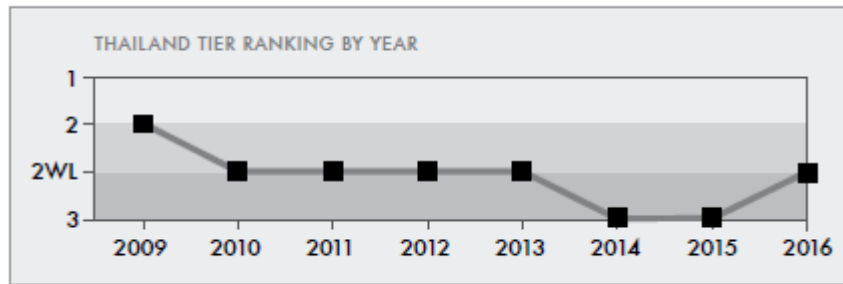
¹⁹ Departement of State, USA.2014.*Trafficking in Person Report 2014*

dalam menangani dan memerangi *human trafficking*, namun memiliki niat dan kemauan untuk memenuhinya.

Sementara Tier 2 Watch List adalah negara yang berusaha memerangi perdagangan manusia dengan memenuhi upaya atau aturan dalam *US Anti-Trafficking Law*, tetapi masih menghadapi tantangan yang signifikan dan apabila negara tersebut secara terus menerus berada di Tier 2 Watch List maka secara otomatis ia akan jatuh di peringkat terakhir. Peringkat Tier terakhir yaitu Tier 3 memiliki definisi sebuah negara yang dalam memerangi *human trafficking* tidak memenuhi standar yang ada dalam *US Anti-Trafficking Laws*. Apabila suatu negara berada di peringkat ini maka ia akan dikenakan sanksi oleh pemerintah Amerika Serikat.

Sanksi tersebut berupa pengurangan atau pemberhentian pemberian dana bantuan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam bidang edukasi dan budaya, dan juga pemerintah Amerika Serikat dapat memberikan *vote* untuk mempersulit pemberian dana pinjaman dari bank pembangunan IMF.²⁰ Peringkat paling tertinggi yaitu Tier 1, dimana negara sudah memenuhi standar minimum dalam memerangi *human trafficking* sesuai dengan *US Anti-Trafficking Laws*. Penurunan peringkat yang dialami oleh pemerintah Thailand dapat dilihat melalui grafik dibawah;

²⁰ Departement of State, USA.2016.*Trafficking in Person Report 2016* hal. 42

Gambar 2.3 Grafik Peringkat Thailand dalam memerangi *human trafficking*

Sumber: TIP Report 2016, *Departement of State of USA*²¹

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan yang signifikan dimulai tahun 2009 hingga tahun 2015. Pemerintah Thailand melaporkan bahwa mereka telah melakukan investigasi 280 perdagangan manusia, dan memberikan hukuman kepada 155 pelaku perdagangan manusia.²² Yang mana merupakan jumlah lebih sedikit dari pada penanganan kasus dan memberikan hukuman kepada pelaku perdagangan pada tahun 2013. Pada tahun 2013 pemerintah Thailand menginvestigasi 674 kasus dan menghukum 483 pelaku perdagangan manusia.²³

Sebagai negara yang besar Thailand merupakan negara maju diantara negara-negara tetangga disekitarnya, sehingga Thailand merupakan negara tujuan bagi para pelaku perdagangan manusia untuk masuk dan melakukan perdagangan manusia. Tercatat pada tahun 2009, 530 korban perdagangan manusia yang berasal dari negara sekitar Thailand, sementara 103 korban perdagangan manusia yang merupakan warga Thailand yang berada di luar negeri.²⁴ 530 korban

²¹ Ibid. hal. 366

²² Departement of State, USA.2015.*Trafficking in Person Report 2015* hal. 331

²³ Ibid.

²⁴ UNIAP.2015.*Thailand Human Trafficking Datasheet* Hal. 2

perdagangan manusia dengan spesifikasi 57 orang merupakan warga Kamboja, 2 orang merupakan warga negara China, 195 orang warganegara Laos, 260 merupakan warga negara Myanmar, 11 orang warga negara Vietnam dan 5 orang lainnya tidak teridentifikasi.²⁵

Setelah terbitnya *TIP Report* tahun 2015, pemerintah Thailand mengecam keras pemerintah Amerika Serikat karena menilai Thailand tidak melakukan suatu perubahan atau memerangi *human trafficking* secara serius. Semenjak itu pula pemerintah Thailand melakukan berbagai hal untuk memenuhi standar yang diajukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sehingga seperti yang kita lihat di grafik 1.1, adanya kenaikan tingkat Tier yang di raih oleh pemerintah Thailand menjadi Tier 2 *Watch List*.

Pada tahun 2014 pemerintah Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Thailand karena tidak adanya upaya pemerintah Thailand dalam menangani *human trafficking* yang menyebabkan turunnya Thailand secara otomatis dari Tier 2 *Watch List* menjadi Tier 3. Pemerintah Amerika Serikat dan juga Uni-Eropa yang prihatin akan pelanggaran hukum tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam hal perikanan/ pertambakan udang, menyulitkan Thailand dalam bernegosiasi mengenai *free trade agreement* dengan Amerika Serikat maupun Uni-Eropa.²⁶ Selain itu pemerintah Amerika Serikat juga memiliki pilihan lain dalam menekan pemerintah Thailand untuk meningkatkan upayanya dalam memerangi *human trafficking*.

²⁵ Ibid.

²⁶ Rogozhina, Natalia. 2014. *US Sanctions Against Thailand* diunduh dari [http://www.journal-neo.org/2014/08/29/rus-Amerika Serikat nskie-sanktsii-teper-i-protiv-tajlanda/](http://www.journal-neo.org/2014/08/29/rus-Amerika%20Serikat%20nskie-sanktsii-teper-i-protiv-tajlanda/)

Pemerintah Amerika Serikat membatasi jumlah dana pinjaman yang IMF dan World Bank berikan kepada pemerintah Thailand.²⁷ Perusahaan-perusahaan di Thailand juga mendapatkan kemungkinan besar masuk kedalam *black list* pasar dunia. Sehingga retailer terbesar di dunia yaitu Costco, Walmart, Carrefour, dan Tesco dengan sukarela membatasi ataupun melarang adanya udang impor dari Thailand yang mana dapat menyebabkan kerugian sebesar 7 juta US dolar pada perekonomian Thailand.²⁸

Melihat Thailand sebagai negara besar sebagai negara tujuan, transit, ataupun pengirim perdagangan manusia merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti, dengan presentase kasus *human trafficking* di Thailand menempati urutan nomer dua di Asia Tenggara. Selain itu Thailand juga menempati peringkat ke empat sebagai negara tujuan dari *human trafficking* di dunia. Dan dengan adanya hubungan diplomatik antara Thailand dan Amerika Serikat yang sudah terjalin selama lebih dari satu abad.

Maka dari itu merupakan suatu hal yang menarik apabila menganalisis bagaimana upaya diplomasi pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi *human trafficking* di Thailand dengan mengambil jangka waktu sejak tahun 2013-2016. Karena pada tahun tersebut terjadi sebuah kudeta pemerintahan dan perubahan dalam sistem pemerintahan Thailand, yang membuat pemerintah Amerika Serikat sangat menyayangkan akan terjadinya hal tersebut. Selain itu

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

pula pada tahun 2016 terlihat adanya perubahan peringkat yang di raih oleh Thailand dari Tier 3 menjadi Tier 2 Watch List.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, indentifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu, bagaimana upaya diplomasi pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi *human trafficking* di Thailand pada tahun 2013-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini guna melihat bagaimana upaya diplomasi pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi *human trafficking* di Thailand pada tahun 2013-2016. Yang mana penulis juga memberikan sebuah gambaran akan upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini peneliti ingin memberikan sedikit gambaran proses *bilateral diplomacy* pemerintah Amerika Serikat terhadap upaya pemerintah Thailand dalam memerangi *human trafficking* pada tahun 2013-2016.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Studi Terdahulu

Dalam bukunya yang berjudul *Modern Diplomacy*, Barston mendefinisikan diplomasi menjadi tiga.²⁹ Yang pertama ialah diplomasi merupakan sebuah instrumen dari *foreign policy* dalam memenuhi *national interest* suatu negara, yang kedua diplomasi dilakukan melalui cara damai tanpa menimbulkan konflik. Dan yang terakhir adalah diplomasi dilakukan dengan cara adanya protokol diplomatik dan prosedur yang di wakili oleh agen diplomasi yang terakreditasi. Selain itu Barston juga menjelaskan bahwa adanya 6 *Tasks* dalam diplomasi.³⁰ 6 *Tasks* tersebut adalah *ceremonial, management, information & communication, international negotiation, duty of protection, dan contribution to international order*.³¹ Barston juga menjelaskan bahwa dalam suatu diplomasi itu tidak harus memiliki ke 6 *tasks* tersebut.

Ceremonial tasks ini seringkali terdapat dalam bentuk diplomasi tradisional dimana ia mempunyai 3 fungsi dasar didalamnya yaitu, *protocol, representatition, dan visits*.³² Karakteristik yang dimiliki oleh *tasks* ini adalah ia memiliki protokol formal, representasi negara, dan adanya kunjungan-kunjungan yang bersifat formal dalam suatu proses diplomasi. Dalam *tasks* kedua yaitu *management,*

²⁹ Keith dan Langhorn Hamilton, Richard.1995.*The Practice of Diplomacy*.London; Routledge ; dalam R.P Barston.2013.*Modern Diplomacy Forth Edition*.London; Routledge

³⁰ R.P Barston.2013.*Modern Diplomacy Forth Edition*.London; Routledge

³¹ Ibid.

³² Ibid.

menggambarkan bahwa suatu poses diplomasi sering kali digunakan dalam kerjasama ekonomi, baik bilateral maupun multilateral.³³ Umumnya diplomasi jenis ini memiliki jangka waktu yang lebih pendek dibanding dengan yang lain. Karakteristik dari diplomasi jenis ini adalah adanya koordinasi, konsultasi, proses *lobbying*, *adjustment*, dan memiliki suatu agenda official atau disertai dengan kunjungan-kunjungan secara *private*. Dalam diplomasi jenis ini seringkali terjadi promosi dan *management of interest*, yang mana bagi sebagian negara didominasi oleh isu-isu finansial, ekonomi, *resources issues*, dan pariwisata yang juga disertai dengan *threat management*.³⁴

Tasks ketiga yaitu *Information and Communication* menjelaskan bagaimana diplomasi pada era kini dapat pula memiliki fungsi dalam menambah informasi dan penilaian satu negara dengan negara lainnya, termasuk bertindak sebagai *listening post* atau sistem peringatan dini.³⁵ Mengutip dari Humphrey, yang mengatakan bahwa terlepas dari negosiasi, tugas dasar dari seorang duta besar adalah memberikan laporan tentang kondisi politik, sosial dan ekonomi yang terjadi di negara yang ia tinggali.³⁶ Selain itu seorang duta besar (representasi negara) juga wajib memberikan laporan mengenai kebijakan suatu negara tersebut dan bagaimana pembicaraan yang dilakukan dengan para petinggi negara dan

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

pemerintah setempat. Terdapat dua kata kunci utama yang dapat mendefinisikan fungsi ini dengan baik yaitu *assessment & reporting*, dan *monitoring*.³⁷

Dalam *tasks* keempat yaitu *international negotiation*, diplomasi yang dijalankan dapat berbentuk sebuah negosiasi internasional. *Tasks* kelima yaitu, *Duty of Protection* dimana diplomasi memiliki fungsi atau tujuan untuk proteksi. Terakhir, pada *tasks* keenam yaitu *Contribution to International Order* diplomasi yang dilakukan dalam hal ini biasanya berkaitan erat dengan konflik, *dispute*, dan *international order*.³⁸

Dalam tulisan ini penulis akan menulis mengenai diplomasi yang dilakukan Amerika Serikat kepada Thailand, karena apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Thailand sesuai dengan ketiga definisi diplomasi yang diberikan oleh Barston. Selain itu juga diplomasi yang dilakukan Amerika Serikat kepada Thailand sesuai dengan satu dari enam *tasks* diplomasi yang dijelaskan oleh Barston yaitu, *information & communication* yang menjelaskan bahwa diplomasi dapat berfungsi *assesment, reporting & monitoring*.³⁹ Yang mana sebelumnya Barston juga menjelaskan bahwa dalam suatu bentuk diplomasi dapat mewakili satu dari keenam *tasks* yang ia sebutkan dan tidak harus memiliki keenam-enamnya.

Pada studi terdahulu kedua penulis menggunakan buku milik Kishan S. Rana yang berjudul *Bilateral Diplomacy*. Dalam bukunya, Kishan menjelaskan

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

mengenai apa yang dimaksud dengan *Bilateral Diplomacy*. Kishan membedakan antara diplomasi dengan kebijakan luar negeri, dimana diplomasi merupakan sebuah cara untuk memenuhi kebijakan luar negeri yang dilaksanakan oleh menteri luar negeri dan diterapkan oleh para diplomat.⁴⁰

Ia juga menjelaskan mengenai perkembangan diplomasi yang terjadi di dunia internasional, yang mana ia jabarkan dengan munculnya *multilateral diplomacy* dan juga globalisasi yang membuat sistem dalam diplomasi bilateral juga berubah.⁴¹ Yang mana selanjutnya ia jelaskan bahwa diplomasi bilateral merupakan sebuah aktivitas vital yang dilakukan oleh dua negara guna memenuhi kepentingan nasional negaranya. Dan bertumpu pada peran representatif suatu negara yang berperan sebagai *co-manager* hubungan diplomasi antar negara tersebut dan dalam suatu diplomasi bilateral isu politik merupakan suatu fondasi dasar yang sering di temui.

Dalam tulisannya Kishan juga menjelaskan akan perubahan fungsi diplomasi. Fungsi diplomasi yang di jelaskan oleh Konvensi Vienna tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik memiliki lima fungsi, yaitu:⁴²

- a. **Representing**, dimana diplomasi yang dilakukan harus merepresentasikan negara pengirim diplomat (*the sending states*) di dalam negara penerima (*the receiving states*).

⁴⁰ Rana, Kishan S.2007.*Bilateral Diplomacy*. DiploFoundation; Belgrade

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

- b. **Protecting**, dimana diplomasi yang dilakukan harus melindungi kepentingan nasional *the sending states* di dalam *the receiving states*, dan dalam limit yang di perbolehkan oleh hukum internasional.
- c. **Negotiating**, adanya proses negosiasi yang dilakukan oleh *the sending states* dan *the receiving states*.
- d. **Ascertaining**, mengetahui dengan pasti kondisi dan perkembangan dalam *the receiving states* tanpa melanggar hukum yang ada, dan melaporkannya kepada *the sending states*.
- e. **Promoting**, mempromosikan hubungan persahabatan antara *the receiving states* dan *the sending states*, dan juga mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan pendidikan.

Namun, seiring berjalannya waktu, dinamika dunia internasional juga berubah. Fungsi-fungsi tersebut dinilai Kishan memerlukan beberapa perubahan. Kishan mengkritik bahwa fungsi negosiasi yang tidak lagi menjadi tugas utama dari para diplomat yang mana merupakan perwakilan resmi negara. Hal itu dikarenakan kini adanya aktor-aktor *non-state* lain yang juga berperan dalam proses negosiasi.⁴³ Maka dari itu Kishan menjabarkan lima fungsi baru dari bilateral diplomasi, yaitu *Promotion, Outreach, Feedback, Management, dan Serving*.⁴⁴ Kelima fungsi ini yang nantinya akan penulis gunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam tulisan ini.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 *Bilateral Diplomacy*

Dalam tulisan milik Kishan S. Rana, yang berjudul *Bilateral Diplomacy*.

Kishan menjelaskan bahwa diplomasi merupakan sebuah cara untuk memenuhi kebijakan luar negeri yang dilaksanakan oleh menteri luar negeri dan diterapkan oleh para diplomat.⁴⁵ Dalam tulisannya Kishan membagi fungsi diplomasi bilateral menjadi lima, yaitu *promotion*, *outreach*, *feedback*, *management*, dan *servicing*.⁴⁶ Dalam memenuhi tujuan dari bilateral diplomasi, keempat dari kelima fungsi diatas merupakan hal yang penting. Namun, tidak berarti fungsi ke-lima yaitu *servicing* tidak sama pentingnya dengan yang lain terutama dalam era *global governance* dimana *public services* sangat diperlukan.

Pada fungsi pertama yaitu, ***promotion*** lebih berhubungan dengan bagaimana *the sending state* “menjual” negaranya, dan menggunakan metode yang sama yang digunakan oleh dunia perbisnisan.⁴⁷ Dalam tulisannya Kishan menggambarkan bahwa dalam fungsi ini *the sending state* terkadang dapat mempromosikan negaranya dengan cara memberikan penawaran akan apa yang bisa ia berikan. Dalam bidang ekonomi contohnya, memberikan bantuan dalam bidang ekspor dan mempermudah dalam investasi asing.⁴⁸ Beberapa negara lainnya lebih menonjolkan aspek kebudayaan mereka, contohnya adalah Perancis, Itali dan Jerman.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

Outreach yang merupakan fungsi kedua memiliki definisi yaitu dimana diplomasi memiliki fungsi untuk membuat konstitusi yang baik dan menambah *ally* yang dapat digunakan sebagai sumber informasi, jaringan, dan *accessing opportunities*.⁴⁹ Tugas permanen dan utama dari fungsi ini adalah menciptakan dan mempertahankan hubungan yang telah terjadi diantara kedua negara tersebut. Selain itu *outreach* juga berarti menciptakan sarana dan metode yang dapat mempengaruhi keputusan *the receiver states* dalam mengambil suatu kebijakan, yang mana layak dan diperbolehkan dalam konteks yang sebenarnya dari diplomasi bilateral yang terjalin. Yang mana dilakukan dengan kebijaksanaan tanpa paksaan dan tanpa melanggar Konvensi Wina yang telah ditetapkan.

Fungsi pertama yaitu *promotion* dan fungsi kedua yaitu *outreach* merupakan fungsi dasar dari bilateral diplomasi. Kedua fungsi tersebut merupakan perpanjangan dari peran advokasi, dimana para diplomat harus mencoba dan berusaha memberikan pengaruh kepada *state entities*, parlemen, bisnis, media, akademisi, kelompok *think thank*, dan siapapun yang memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan suatu negara.⁵⁰ Dalam kedua fungsi diplomasi tersebut peran media sangatlah diperlukan.

Fungsi ketiga yaitu *feedback* mengacu pada tugas diplomasi yaitu reportasi, dari *missions* kepada kantor pusat, dari kantor pusat kepada kementerian luar negeri.⁵¹ Biasanya, *feedback* dapat berupa tulisan analisis, atau laporan diskusi dan juga dapat berupa rekomendasi kebijakan terhadap *the receiving states*.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

Sementara fungsi keempat yaitu *management* merupakan tugas dari sistem operasi diplomasi yang dilakukan seperti, menjalankan kedutaan, mengawasi mereka dari kantor pusat, dan memberikan hasil yang maksimal dalam melakukan suatu proses diplomasi.⁵²

Fungsi yang terakhir adalah *servicing*, dimana mengacu pada semua rutin yang dilakukan dalam diplomasi yaitu penyediaan pelayanan konsuler, perlindungan kepada warga negara sendiri, menanggapi pernyataan dari pebisnis, dan menyediakan informasi bagi warga negara sendiri maupun warga negara asing.⁵³ Dalam fungsi terakhir ini diplomasi yang dilakukan lebih bersifat diplomasi konsuler dimana diplomasi yang dilakukan berhubungan langsung dengan representatif dari *the sender state* tentang kinerja dan servis yang diberikan oleh mereka.

2.3 Operasionalisasi Konsep

Dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini penulis menggunakan konsep fungsi *bilateral diplomacy* milik Kishan S. Rana. Kishan S. Rana merupakan profesor *emeritus* di *DiploFoundation* yang terletak di Malta, Jenewa. Ia juga sebelumnya sempat menjadi duta besar India untuk Serbia. Ia menjelaskan bahwa diplomasi merupakan sebuah cara untuk memenuhi kebijakan luar negeri yang dilaksanakan oleh menteri luar negeri dan diterapkan oleh para

⁵² Ibid

⁵³ Ibid.

diplomasi. Ia juga mengkritik akan fungsi diplomasi yang dijabarkan oleh Konvensi Vienna pada tahun 1961, menyebutkan bahwa seiring berubahnya jaman dan berkembangnya sistem internasional maka fungsi diplomasi pun ikut berubah. Kishan membagi fungsi diplomasi bilateral menjadi lima yaitu, *promotion, outreach, feedback, management* dan *servicing*.⁵⁴

Pada tahun 2000, pemerintah Amerika Serikat melihat bahwa *human trafficking* merupakan suatu ancaman besar bagi negara yang mana membuat pemerintah Amerika Serikat melakukan berbagai macam cara guna memerangi *human trafficking*. Salah satunya adalah dengan meratifikasi dan mengadopsi *the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (the Palermo Protocol)*.⁵⁵ Selain itu Amerika Serikat juga membuat suatu undang-undang anti-trafficking yaitu *the Trafficking Victims Protection Act (TVPA)* yang merupakan undang-undang perlindungan terhadap korban *human trafficking* yang di buat pada tahun 2000.

Selain memerangi *human trafficking* secara domestik saja, pemerintah Amerika Serikat menunjukkan komitmennya dengan memeranginya secara global dengan membentuk secara khusus sebuah kantor yang berada di bawah pemerintah Amerika Serikat. Kantor tersebut ialah, *The Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons (TIP Office)*. *TIP Office* merupakan salah sebuah bentuk dari undang-undang anti-trafficking Amerika Serikat yaitu *TVPA* dan

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Departement of State, USA.2016.*Trafficking in Person Report 2016* hal. 32

setiap tahunnya *TIP Office* mengeluarkan laporan mengenai upaya para pemerintah negara-negara di dunia dalam memerangi *human trafficking* di negaranya masing-masing.⁵⁶ Dalam laporan tersebut juga memberikan peringkat-peringkat kepada negara-negara di dunia akan usahanya dalam memerangi *human trafficking*. Dan pada tahun 2014 Thailand yang merupakan negara *ally* terdekat Amerika Serikat di Asia tenggara, menduduki peringkat *tier 3* yang mana merupakan peringkat paling rendah dalam laporan yang dikeluarkan oleh *TIP Office*.⁵⁷ Pemerintah Amerika Serikat pun melakukan segala upaya diplomasi agar pemerintah Thailand meningkatkan upayanya dalam memerangi *human trafficking*.

Dalam menjawab rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu bagaimana upaya diplomasi pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi *human trafficking* di Thailand pada tahun 2013-2016, penulis akan menggunakan konsep fungsi *bilateral diplomacy* menurut Kishan S. Rana. Yang mana menurut Kishan bilateral diplomasi mempunyai lima fungsi utama yaitu *promotion, outreach, feedback, management* dan *servicing*.

Apabila kita membaca pada bab sebelumnya maka telah penulis jelaskan mengenai pengertian dari fungsi pertama dari bilateral diplomasi yaitu dimana *promotion*, mengacu pada bagaimana *the sending state* “menjual” negaranya.⁵⁸ Dalam tulisannya Kishan menggambarkan bahwa dalam fungsi ini *the sending state* terkadang dapat mempromosikan negaranya dengan cara memberikan

⁵⁶ Diunduh dari <http://m.state.gov/mc16465.htm>

⁵⁷ Departement of State, USA.2016.*Trafficking in Person Report 2016*

⁵⁸ Rana, Kishan S.2007.*Bilateral Diplomacy*. DiploFoundation; Belgrade

penawaran akan apa yang bisa ia berikan. Ia mencontohkan dalam bidang ekonomi dengan memberikan bantuan dalam bidang ekspor dan mempermudah dalam investasi asing.⁵⁹ Dalam penelitian ini fungsi *promotion* akan menjelaskan bagaimana pemerintah Amerika Serikat mempromosikan Amerika Serikat kepada Thailand, dengan memberikan penawaran apa yang bisa pemerintah Amerika Serikat berikan kepada Thailand.

Pada fungsi ini penulis akan melihat bagaimana pemerintah Amerika Serikat melakukan fungsi promosi dibidang ekonomi, militer dan pendidikan dan kebudayaan. Dalam melihat fungsi ini penulis melihat aspek apa saja yang ditawarkan pemerintah Amerika Serikat untuk pemerintah Thailand. Pada bidang ekonomi, Amerika Serikat merupakan partner utama pemerintah Thailand dalam hal impor udang yang mana memberikan keuntungan besar setiap tahunnya bagi pemerintah Thailand. Selain itu penulis juga akan melihat dana bantuan dari *U.S Agency For International Development*, dana bantuan dala rangka memerangi perdagangan manusia dan dana bantuan yang berasal dari *Departement of State* yang ditawarkan dari pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Thailand.

Pada fungsi kedua yaitu *Outreach* dijelaskan mengenai diplomasi memiliki fungsi untuk membuat konstitusi yang baik dan menambah *ally* yang dapat digunakan sebagai sumber informasi, jaringan, dan *accessing opportunities*.⁶⁰ Yang mana pada fungsi ini memiliki tugas permanen dan utama dari fungsi ini untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang telah terjadi diantara

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Rana, Kishan S.2007.*Bilateral Diplomacy*. DiploFoundation; Belgrade

kedua negara tersebut. *Outreach* juga berarti bagaimana pemerintah Amerika Serikat menciptakan sarana dan metode yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah Thailand dalam mengambil suatu kebijakan. Dengan cara yang layak dan diperbolehkan dalam konteks yang sebenarnya dari diplomasi bilateral yang terjalin dan dilakukan dengan kebijaksanaan tanpa paksaan dan tanpa melanggar Konvensi Wina yang telah ditetapkan.

Pada fungsi kedua ini penulis melihat bagaimana sebuah NGO yang digunakan sebagai *ally* oleh pemerintah Amerika Serikat dalam mengumpulkan informasi dan dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah Thailand. Selain itu juga penulis akan melihat bagaimana peran media massa yang juga merupakan *ally* dari pemerintah Amerika Serikat dalam mengumpulkan informasi dan mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah Thailand.

Kedua fungsi tersebut merupakan perpanjangan dari peran advokasi, dimana para diplomat harus mencoba dan berusaha memberikan pengaruh kepada *state entities*, parlemen, bisnis, media, akademisi, kelompok *think tank*, dan siapapun yang memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan suatu negara.⁶¹ Dalam kedua fungsi diplomasi tersebut peran media sangatlah diperlukan. Adanya keterlibatan publik dan peran media sangat berpengaruh pada suatu peristiwa yang terjadi dan memastikan bahwa cerita dari sisi yang lain ditampilkan kepada publik, karena hal tersebut juga merupakan hal yang penting.

⁶¹ Ibid.

Pada fungsi ketiga yaitu *feedback* lebih mengacu kepada pada tugas dasar dari diplomasi yaitu reportasi, dari *missions* kepada kantor pusat, dari kantor pusat kepada kementerian luar negeri.⁶² Biasanya, *feedback* dapat berupa tulisan analisis, atau laporan diskusi dan juga dapat berupa rekomendasi kebijakan terhadap pemerintah Thailand. Dalam hal ini *feedback* yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat berupa *TIP Report* yang berupa tulisan analisis dan laporan diskusi mengenai upaya pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia di Thailand. Pemerintah Amerika Serikat juga melakukan beberapa investigasi terhadap perdagangan manusia di Thailand, sehingga ia dapat memberikan beberapa rekomendasi kebijakan terhadap perdagangan manusia yang terjadi di Thailand.

Investigasi dan laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat juga dijadikan dasar sebagai pengambilan kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam melihat upaya Thailand memerangi perdagangan manusia di Thailand. *TIP Report* tersebut merupakan bentuk dari investigasi dan merupakan dasar dari pembuatan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap pemerintah Thailand. Dalam hal ini pemerintah Amerika Serikat menurunkan Thailand di *Tier 3*, pemerintah Amerika Serikat juga menurunkan jumlah impor udang dari Thailand, mempersulit pemberian dana, dan menurunkan jumlah dana bantuan.

Fungsi keempat yaitu *management* merupakan tugas dari sistem operasi diplomasi yang dilakukan seperti, menjalankan kedutaan, mengawasi mereka dari

⁶² Ibid.

kantor pusat, dan memberikan hasil yang maksimal dalam melakukan suatu proses diplomasi.⁶³ Dalam hal ini, *TIP Office* yang berada di bawah *US Department of state* dari pemerintah Amerika Serikat memiliki tugas sebagai kantor pusat dalam mengawasi kedutaan dalam tugasnya dalam hal memerangi perdagangan manusia.

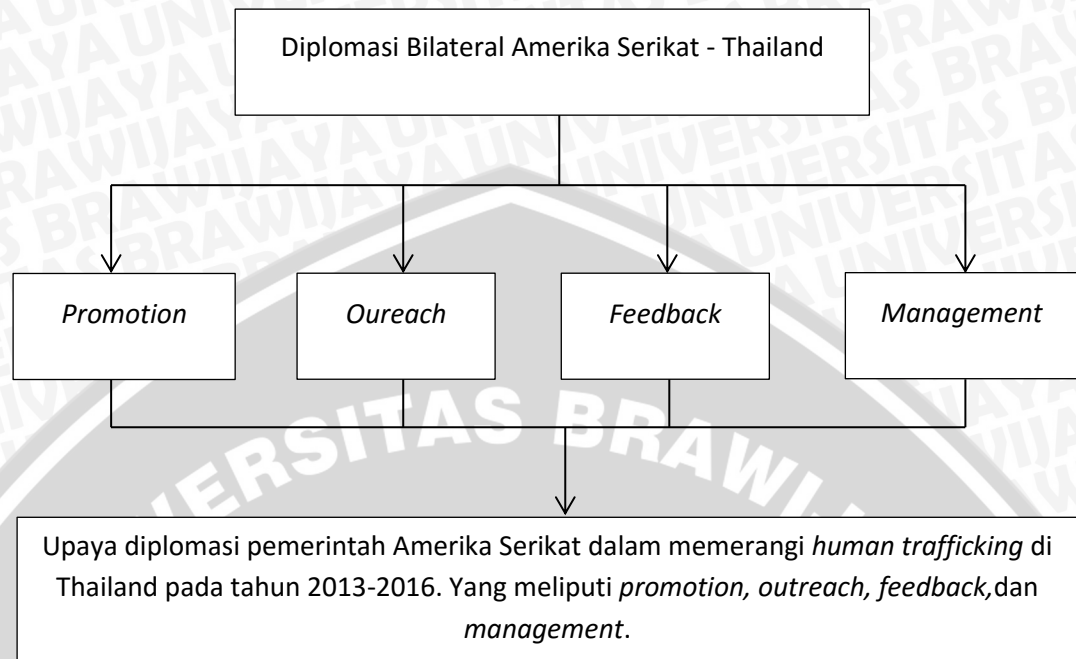
Berikut merupakan tabel operasionalisasi konsep yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 Operasionalisasi konsep

Konsep	Variable	Operasionalisasi
Bilateral Diplomacy	<i>Promotion</i>	Pemerintah Amerika Serikat melakukan fungsi promosi. Melalui bidang Ekonomi.
	<i>Outreach</i>	<i>Ally</i> yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam menambah informasi, jaringan, dan <i>accessing opportunities</i> yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah Thailand adalah; a. NGO b. Media Massa
	<i>Feedback</i>	Reportasi, analisis, laporan diskusi dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam <i>TIP Report</i> .
	<i>Management</i>	<i>TIP Office</i> bertugas sebagai kantor pusat dalam mengawasi kedutaan dalam tugasnya dalam hal memerangi perdagangan manusia.

⁶³ Ibid

2.4 Alur Pemikiran



2.5 Argumen Utama

Dalam memerangi *human trafficking* yang ada di Thailand pada tahun 2013-2016, pemerintah Amerika Serikat melakukan berbagai upaya diantaranya adalah *promoting* dimana pemerintah Amerika Serikat kepada Thailand, dengan memberikan penawaran apa yang bisa pemerintah Amerika Serikat berikan kepada Thailand. Penawaran tersebut diberikan melalui bidang ekonomi. Lalu *outreach* yaitu pemerintah Amerika Serikat menggunakan media massa dan NGO sebagai *ally* yang dapat digunakan sebagai sumber informasi, jaringan, dan *accessing opportunities* dan pemerintah Yang mana nantinya mereka dapat mempengaruhi keputusan Pemerintah Thailand dalam mengambil suatu kebijakan dalam isu perdagangan manusia.

Dan yang ketiga adalah *feedback* dimana pemerintah Amerika Serikat memberikan reportasi, tulisan analisis, laporan diskusi terhadap upaya pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia. Dan yang mana nantinya *feedback* tersebut akan mempengaruhi bagaimana pengambilan kebijakan pemerintah Amerika Serikat kepada Pemerintah Thailand dalam upayanya memerangi perdagangan manusia. Dalam hal ini, pemerintah Amerika Serikat menerbitkan *TIP Report* yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan yang akan pemerintah Amerika Serikat ambil terhadap upaya pemerintah Thailand.

Dan upaya diplomasi yang keempat yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat adalah *management* dimana *TIP Office* yang berada di bawah *Departement of State* berfungsi sebagai kantor pusat dan menjalankan kedutaan, mengawasi dari kantor pusat, dan memberikan hasil yang maksimal dalam membantu pemerintah Thailand menangani perdagangan Manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis Deskriptif Analisis. Deskriptif Analisis adalah suatu usaha untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu masalah atau isu dengan memasukan analisis kedalamnya. Dalam penelitian ini, metode deskriptif analisis digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menjelaskan analisis upaya diplomasi pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi *human trafficking* di Thailand pada tahun 2013-2016.

3.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini memiliki batasan penelitian terhadap upaya diplomasi pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi *human trafficking* di Thailand. Selain itu juga penelitian ini memiliki waktu penelitian 2013-2016, dimana pada tahun 2013 hingga 2016 terjadi penurunan upaya pemerintah Thailand dalam rangka memerangi *human trafficking* dan pada tahun 2014 pemerintah Thailand yang menempati Tier 2 Watch List di tahun 2013 turun menjadi Tier 3.

3.3 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*Library Research*) dengan cara mengumpulkan sejumlah data sekunder seperti artikel, jurnal, laporan, buku teks, surat kabar, majalah, serta berita dai

media elektronik seperti televisi, radio dan internet yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Analisa Data

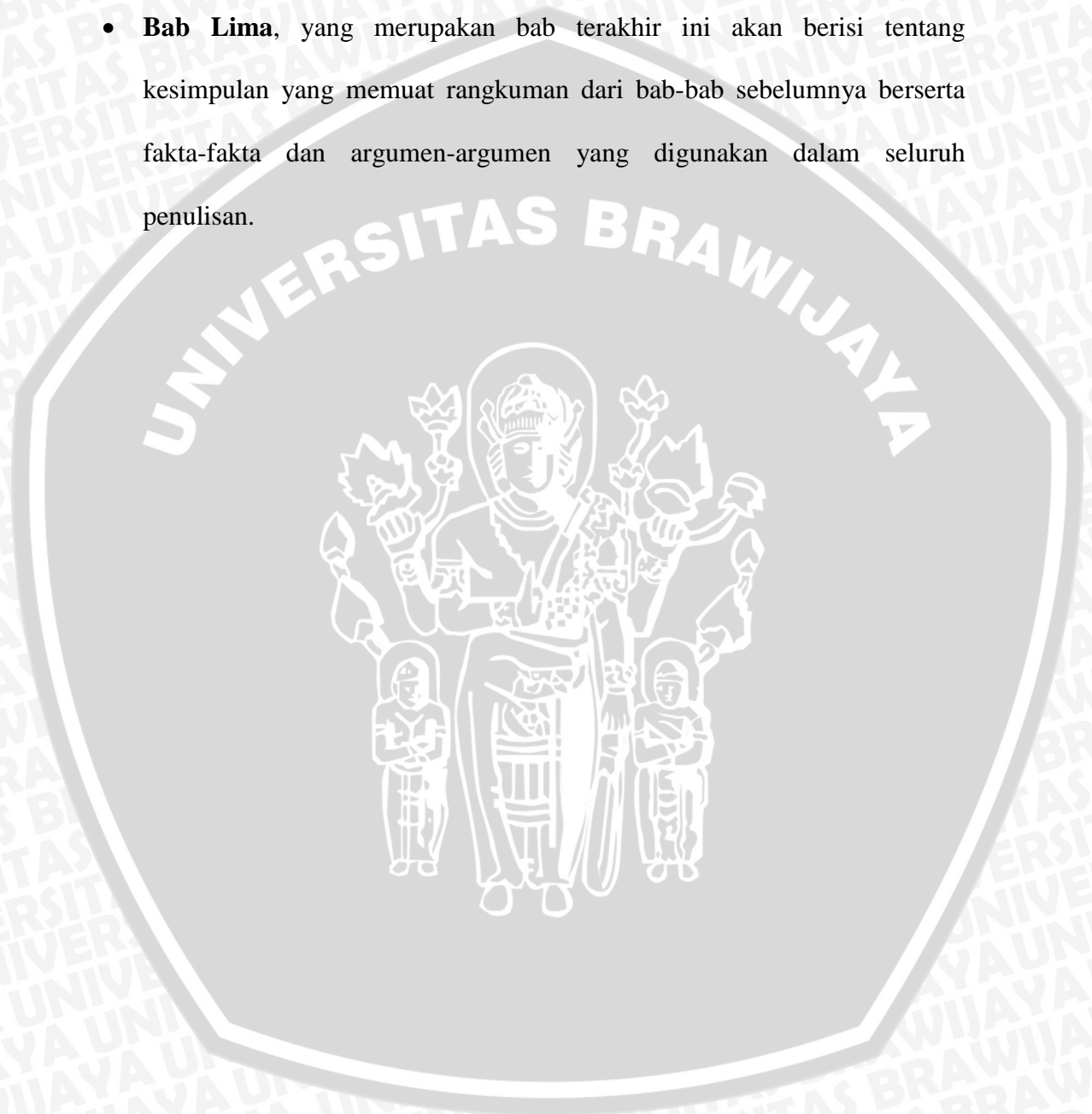
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Dimana penulis tidak menganalisis data lapangan tetapi menggunakan teknik *Library Research*.

3.5 Sistematika Penulisan

Guna menjelaskan hasil analisis upaya diplomasi pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi *human trafficking* di Thailand pada tahun 2013-2016, maka penulis menyusun pembahasan yang berupa;

- **Bab Satu**, akan menjelaskan mengenai Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.
- **Bab Dua**, menjelaskan mengenai Kerangka Pemikiran yang terdiri dari Studi Terdahulu, Kerangka Konseptual (yang menjelaskan mengenai Konsep Bilateral Diplomasi), Definisi Operasional, Alur Pemikiran dan Argumen Utama.
- **Bab Tiga**, membahas mengenai Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data dan Sistematika Penulisan.

- **Bab Empat**, penulis akan melakukan analisa upaya diplomasi pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi *human trafficking* di Thailand pada tahun 2013-2016.
- **Bab Lima**, yang merupakan bab terakhir ini akan berisi tentang kesimpulan yang memuat rangkuman dari bab-bab sebelumnya beserta fakta-fakta dan argumen-argumen yang digunakan dalam seluruh penulisan.



BAB IV

Gambaran Umum

4.1 *Human Trafficking* di Thailand

Yang dimaksud dengan *human trafficking* (perdagangan manusia) adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan dan atau memberi, menerima bayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Eksplorasi termasuk eksploitasi untuk melacurkan orang lain, mempekerjakan dan memperbudak orang lain secara paksa dan juga dapat berupa pengambilan organ tubuh orang lain.⁶⁴ Selain itu pula, pemerintah Amerika Serikat mengklasifikasikan dan mendefinisikan *human trafficking* menjadi dua kategori yaitu *sex trafficking* dan *labor trafficking*.⁶⁵ Seringkali kebanyakan orang sulit membedakan antara perdagangan manusia dan *smuggling* (penyelundupan

⁶⁴ PBB.2000. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, human trafficking*

⁶⁵ ASPE.2009. *Human Trafficking Into And Within The United States: A Review of The Literature* diunduh dari <https://aspe.hhs.gov/basic-report/human-trafficking-and-within-united-states-review-literature#What>

manusia). Perdagangan manusia dan penyelundupan manusia bisa dibedakan melalui enam poin.⁶⁶

Pertama adalah penyelundupan manusia merupakan bagian dari fenomena internasional, sementara perdagangan manusia tidak. Hal itu di jelaskan di ciri kedua diaman penyelundupan manusia melibatkan adanya pelintasan batas antara satu negara kenegara lain atau bersifat internasional, sementara perdagangan manusia tidak. Poin ketiga dan keempat terletak pada penggunaan paksaan dan hasutan, dalam penyelundupan manusia tidak memerlukan adanya paksaan dan hasutan, karena kedua belah pihak setuju akan adanya penyelundupan tersebut yang mana berbeda dengan perdagangan manusia yang memerlukan adanya paksaan entah pada saat perekrutan atau setelah perekrutan terjadi. Selain itu pula dalam kasus penyelundupan manusia, para korban penyelundupan seringkali membayar para penyelundup untuk menyelundupkan mereka, sementara perdagangan manusia, keuntungan biasanya berada di tangan para palaku perdagangan.

Kelima, tidak seperti penyelundupan manusia, perdagangan manusia melibatkan pemaksaan dan pengeksploitasian terus menerus antara pelaku perdagangan dan korban perdagangan. Dimana hal tersebut berbeda dengan penyelundupan manusia, yang mana hubungan antara penyelundup dan korban penyelundupan berakhir apabila korban sudah sampai di negara tujuan. Terakhir yaitu poin ke-enam, perlakuan penyelundup manusia dengan pelaku perdagangan

⁶⁶ Holmes, Leslie.2010.*Trafficking and Human Rights: European and Asia-Pacific Perspectives*.Cheltenham; Inggris hal. 2

manusia berbeda. Dimana pelaku penyelundupan manusia menganggap bahwa ia menolong para korban penyelundupan, untuk mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan apabila pelaku perdagangan manusia ia mementingkan keuntungannya sendiri.

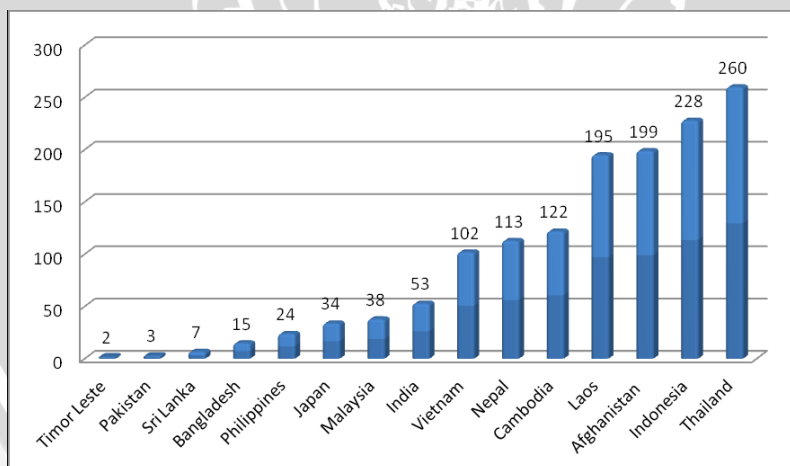
Didalam peluncuran *Global Report On Human Trafficking In Persons* yang diluncurkan di New York, Direktur Eksekutif UNODC, Anotion Maria Costa beranggapan bahwa para pemerintah di dunia masih dalam tahap penyangkalan dalam hal perdagangan manusia.⁶⁷ Ia juga menjelaskan bahwa seringkali para pemerintah di negara-negara di dunia mengabaikan tugas mereka dalam memberikan laporan, atau mengusut kasus perdagangan manusia. Selain itu ia juga menunjukkan fakta bahwa semakin banyaknya jumlah penghukuman bagi para pelaku perdagangan manusia, namun dua dari lima negara yang diteliti oleh *UNODC Report* tidak ada dari mereka yang menjelaskan akan adanya penghukuman bagi para pelaku perdagangan manusia.

Menurut data statistik yang ada jumlah perdagangan manusia kini telah melebihi jumlah penjual-belian senjata ilegal, yang mana nantinya apabila hal ini dibiarkan terjadi maka angka perdagangan manusia akan mengalahkan angka penjualan obat-obatan terlarang dalam beberapa tahun kedepan. Obat-obatan terlarang hanya sekali pakai dan mereka habis, namun korban dari perdagangan manusia bisa dipakai dan disiksa berulang-ulang.

⁶⁷ UNODC.2014.*UNODC report on human trafficking exposes modern form of slavery* diunduh dari <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html>

Thailand merupakan sebuah negara besar yang terletak di Asia Tenggara dan berbatasan dengan empat negara lainnya yaitu Myanmar, Laos, Kamboja dan Malaysia.⁶⁸ Dengan jumlah populasi penduduk kurang lebih 67.976.405 jiwa,⁶⁹ Thailand memiliki potensi besar terhadap *human trafficking*. Dengan dikelilingi oleh negara-negara yang rentan akan konflik menjadikan Thailand sebagai negara tujuan *human trafficking*. Umumnya, para korban *human trafficking* melakukan migrasi keluar dari negaranya guna mencari kehidupan yang lebih baik, atau mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Mereka beranggapan, bahwa dengan melakukan migrasi mereka akan menemukan kehidupan dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Menurut laporan UNIAP, Thailand merupakan negara tujuan, pengirim serta negara transit bagi para korban *human trafficking* terbesar di Asia Tenggara.⁷⁰

Gambar 4.1 Grafik IOM Assistance to Trafficked Persons on 2011



Sumber: IOM Annual Report 2011 Counter Trafficking⁷¹

⁶⁸ CIA.-. *The World Factbook* diunduh dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html>

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ UNIAP. 2015. *Thailand Human Trafficking Datasheet* Hal. 1

⁷¹ IOM. 2011. *IOM Annual Report 2011 Counter Trafficking* hal.30

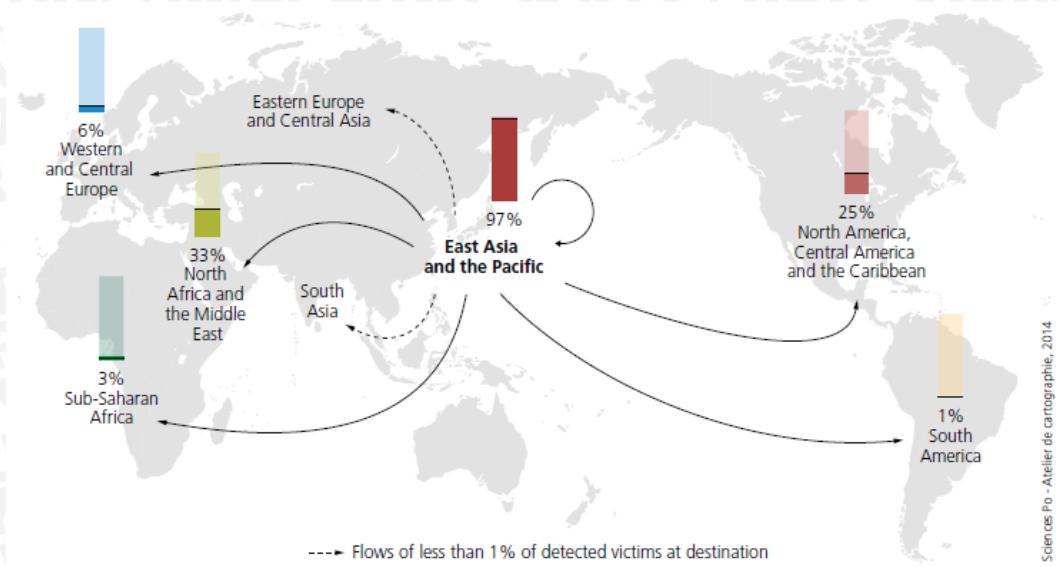
Apabila kita melihat bagan diatas maka dapat kita lihat bahwa IOM menangani kasus *human trafficking* dengan jumlah yang lebih banyak di Thailand apabila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Bentuk dari *human trafficking* yang sering ditemui di Thailand adalah *forced labour* dan *commercial sexual exploitation (sex trafficking)*.⁷² Thailand juga merupakan negara pengirim dalam hal *human trafficking*, warganegara Thailand diperdagangkan ke negara-negara dengan kehidupan ekonomi yang cukup maju seperti Australia, Bahrain, Brunei, Kanada, Jerman, Indonesia, Israel, Jepang, Korean, Kuwait, Libia, Malaysia, Maladewa, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Afrika Selatan, Korea Selatan, Taiwan, Eropa Tengah, dan Amerika Serikat.⁷³

Beberapa korban *human trafficking* di Thailand berasal dari negara sekitar yaitu seperti Kamboja, Laos, Myanmar, Rusia, China bagian selatan, Uzbekistan dan Vietnam. Beberapa dari mereka bermigrasi ke Thailand untuk mencari suaka maupun untuk menghindari konflik, seperti pengungsi Rohingya dari Myanmar yang bermigrasi ke Thailand untuk mencari suaka namun mereka berakhir menjadi korban *human trafficking*. Selain itu beberapa dari mereka juga di paksa kedalam *forced labour* dengan beberapa bentuk pekerjaan seperti memancing (pemancingan), bekerja di pabrik-pabrik industri, di sektor agrikultur, sektor konstruksi, pekerjaan rumah tangga dan juga di paksa menjadi pengemis. Namun, kebanyakan korban wanita dan perempuan diperdagangkan untuk bekerja di bidang *comercial sexual exploitations*.

⁷² Opcit.

⁷³ Ibid.

Gambar 4.2 Destinations of Trafficking Victims Originating in East Asia and The Pasific



Sumber: *Global Report on Trafficking in Persons 2014*⁷⁴

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa negara-negara di Asia Timur dan di kawasan Pasifik termasuk Thailand, merupakan pengirim perdagangan manusia dengan menjadikan negara-negara di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah sebagai tujuan kedua dengan presentase 33%. Dan disusul oleh negara-negara di kawasan Amerika Serikat Utara dan Tengah dan juga negara-negara di kawasan Caribbean sebagai tujuan ketiga dengan presentase 25%. Namun, umumnya tujuan utama dari para pengirim perdagangan manusia adalah negara tetangga sekitar yang berada di kawasan Asia Timur dan Pasifik, dengan presentase 97%.

Beberapa korban perdagangan manusia yang berada di Thailand berasal dari negara-negara tetangga di sekitar Thailand, yaitu, Cina, Vietnam, Rusia,

⁷⁴ UNODC.2014. *Global report on Trafficking in Persons 2014* hal. 79

Uzbekistan, India dan Fiji.⁷⁵ Beberapa dari mereka melakukan migrasi ke Thailand dengan bantuan dari keluarga mereka ataupun organisasi penyelundupan manusia, dan tujuan utama mereka seringkali untuk mencari kehidupan yang lebih baik yang sayangnya berakhir dengan perdagangan manusia. Namun, jumlah terbesar pekerja migran di Thailand berasal dari negara tetangga Thailand yaitu Myanmar.

Diperkirakan ada sekitar dua hingga tiga juta pekerja migran yang berasal dari Myanmar.⁷⁶ Sama seperti para pekerja migran lainnya, beberapa dari mereka melakukan migrasi guna mencari kehidupan yang lebih baik ataupun mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga mereka di negara asal. Puluhan ribu korban perdagangan manusia yang berada di Thailand dipaksa, dihasut dan ditipu sehingga mereka terjerumus kedalam pekerjaan seperti seks komersil ataupun buruh (*forced labour*).⁷⁷

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi berkembangnya perdagangan manusia di Thailand. Salah satunya adalah kegagalan pemerintah Thailand dalam menangani, dalam hal ini beberapa oknum pemerintah Thailand terlibat langsung dengan perdagangan manusia. Dalam tahun 2014 ditangkap delapan oknum pemerintah Thailand yang terlibat dalam perdagangan manusia, entah sebagai pelaku, penyalur ataupun menerima suap dari pelaku perdagangan manusia.⁷⁸ Delapan oknum tersebut adalah 4 anggota kepolisian, 1 oknum angkatan laut, 2

⁷⁵ Departement of State, USA.2014.*Trafficking in Person Report 2014*

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Pemerintah Thailand.2015.*Thailand's Progress Report on Anti-Human Trafficking Efforts* hal. 2

orang pemerintah daerah, dan 1 anggota pemerintahan di bagian ketenagakerjaan.⁷⁹

Beberapa dari oknum tersebut seringkali ditemukan bekerja di kedua belah pihak yaitu baik negara pengirim maupun negara penerima. Dalam kasus Thailand mereka seringkali ditemukan bekerja di perbatasan anatar Laos, Myanmar dan Kamboja.⁸⁰ Dimana, disana mereka akan menemukan banyak para pekerja migran, atau korban penyelundupan manusia tanpa adanya dokumen legal yang mana nantinya akan berujung menjadi korban perdagangan manusia. Seringkali, para oknum tersebut juga memfasilitasi para *undocumented migrants* untuk masuk kedalam negaranya.⁸¹

Selain itu, beberapa warga negara Thailand yang juga bekerjasama dengan aparat militer Thailand dilaporkan bekerjasama dalam menyelundupkan para *Rohingya Asylum Seeker* yang berasal dari Myanmar dan Banglades, guna diperjual-belikan dalam bentuk *force labour* dibidang *seafood industry*, khususnya udang.⁸² Di laporan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2013 yaitu *Trafficking In Persons Report*, terdapat 17% dari nelayan yang di survey bekerja di kapal jarak pendek bahwa mereka mengalami kondisi *force labour*.⁸³

Selain itu di laporan yang sama yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2010, menjelaskan adanya resiko dari perdagangan manusia

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Departement of State, USA.2014.*Trafficking in Person Report 2014*

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

dalam bentuk *force labour* diantara para pekerja migran yang berasal dari Myanmar yang bekerja di *seafood industry* di Samut Sakhon. Ditemukan 57% dari 430 pekerja yang telah di survey mengalami kondisi *force labour*.⁸⁴ Laporan tersebut juga menyatakan bahwa *force labour* terus menerus menjadi suatu bentuk perdagangan manusia yang lazim, dan dengan adanya peningkatan pengawasan dari dunia internasional telah menyebabkan para pelaku perdagangan manusia untuk menggunakan metode baru, sehingga membuat kejahatan mereka lebih sulit untuk dideteksi.

Beberapa pria dari Thailand, Myanmar dan Kamboja dipaksa untuk bekerja (mengalami bentuk *force labour*) di kapal ikan yang berbendera Thailand di perairan Thailand dan Internasional, berhasil diselamatkan dari negara-negara tetangga Thailand termasuk Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Timor-Leste.⁸⁵ Sementara bentuk perdagangan terbesar kedua di Thailand yaitu *sex trafficking*. Para korban dari *sex trafficking* umumnya para wanita dan anak-anak yang berasal dari Thailand, Laos, Vietnam, dan Myanmar dan termasuk beberapa yang pada awalnya ingin mencari kerja di Thailand di bidang seks komersil yang berujung pada *sex trafficking*.⁸⁶

Anak anak yang terjerumus kedalam *sex trafficking* biasanya dapat ditemui di panti pijat, bar, tempat karaoke, hotel dan rumah-rumah pribadi.⁸⁷ Mereka yang memiliki dokumen atau identitas palsu dieksploitasi dalam perdagangan seks di

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid.

karaoke atau panti pijat. Di tahun 2014 sebuah LSM lokal melaporkan adanya peningkatan dalam penggunaan media sosial untuk merekrut wanita dan anak-anak kedalam *sex trafficking*.⁸⁸ Korban mengalami *sex trafficking* di tempat-tempat yang melayani permintaan lokal di dunia usaha di Bangkok, dan di Chiang Mai mereka cenderung melayani permintaan wisatawan asing dalam hal seks komersil.⁸⁹ Bukanlah, suatu hal yang asing lagi apabila kita membicarakan pariwisata Thailand yang cenderung mendukung adanya *sex trafficking*. Beberapa media bahkan mengecam pemerintah Thailand dalam hal ketidakpedulian pemerintah Thailand dalam hal *sex trafficking* yang menjadi salah satu tujuan para turis untuk datang ke Thailand.

4.2 Keterkaitan Human Trafficking Thailand terhadap Pemerintah Amerika Serikat

Apabila melihat seberapa jauh hubungan antara pemerintah Amerika Serikat dan Thailand maka kita dapat melihat kembali ke belakang maka dapat kita lihat bahwa hubungan diplomatik Thailand dan Amerika Serikat dimulai sejak tahun 1832 dengan adanya penandatanganan perjanjian persahabatan dan perdagangan yang diresmikan pada tahun 1833.⁹⁰ Ada berbagai macam bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Thailand dan Amerika Serikat. Semenjak perang dunia ke-dua, pemerintah Amerika Serikat dan Thailand mempunyai hubungan diplomatik yang

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Departement of State, USA.-*Thailand-US Relations* diunduh dari <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2814.htm>

kuat dan luas. Beberapa kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan Thailand antara lain di bidang perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan hewan liar, kesehatan publik, pendidikan, kebudayaan, penegakan hukum dan kerjasama keamanan.⁹¹

Thailand dan Amerika Serikat juga bekerjasama dengan PBB dalam menghentikan adanya perdagangan manusia dan juga aktivitas kriminal lainnya. Sejak tahun 1950 Thailand telah menerima berbagai bantuan militer dari Amerika Serikat. Dalam bidang militer, Thailand menerima bantuan berupa perlengkapan militer, *essential supplies*, pelatihan militer, dan juga bantuan dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas dan instalasi militer dari pemerintah Amerika Serikat.⁹² Selain itu, pemerintah Amerika Serikat dan Thailand juga melakukan kerjasama dalam bidang ekspor-impor.

Salah satunya adalah pemerintah Thailand mengirimkan udang kepada pemerintah Amerika Serikat. Sebuah project yang diselenggarakan oleh *Universities of Oregon State* di tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap tahunnya jumlah *seafood* yang dikonsumsi oleh warga negara Amerika Serikat dapat mencapai 14,6 pons.⁹³ Dengan rincian yaitu menempati urutan pertama dengan jumlah konsumsi terbanyak adalah udang dengan total 4,0 pounds, lalu salmon dengan 2,3 pounds, Tuna 2,3 pounds, tilapia 1,4 pounds, Alaska pollock 0,98 pounds, pangasius 0,69 pounds, ikan cod 0,65 pound, lele 0,52 pounds, kepiting

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid.

⁹³ Universities of Oregon State.2014.*Overview of the U.S. Seafood Supply* diunduh dari <http://www.seafoodhealthfacts.org/seafood-choices/overview-us-seafood-supply>

0,51 pounds, dan kerang 0,34 pounds.⁹⁴ Dengan melihat hal tersebut maka dapat disimpulkan apabila dalam hal mengkonsumsi *seafood*, warga Amerika Serikat lebih banyak mengkonsumsi udang.

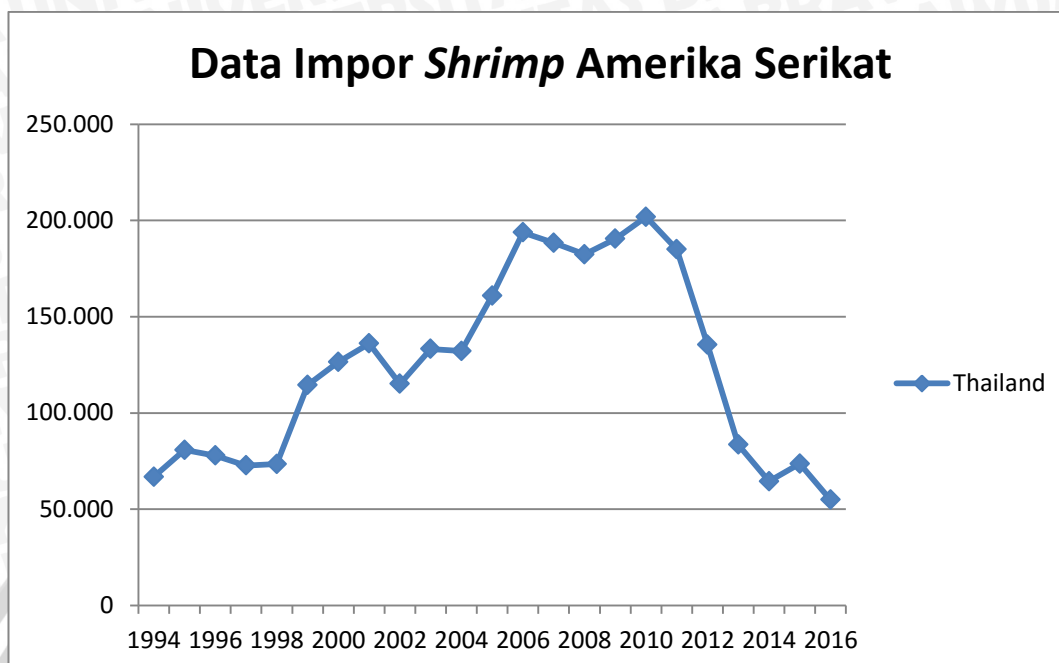
Amerika Serikat merupakan pengimpor udang no.1 di Thailand, begitu pula sebaliknya. Thailand sudah menjadi partner no. 1 Amerika Serikat dalam hal pemasok udang terbesar semenjak tahun 1994, namun hal tersebut terhenti di tahun 2014.⁹⁵ Hal tersebut dikarenakan pemerintah Amerika Serikat menemukan adanya banyak pelanggaran human trafficking di sektor perikanan Thailand yang mana mengacu pada bentuk *force labour*, khususnya shrimp. Posisi terbanyak yang ditempati Thailand pun tergantikan oleh India pada tahun 2014 hingga 2016.⁹⁶ Yang mana di tahun 2016, Thailand turun menjadi ke-4.⁹⁷ Dan hal tersebut pun mempengaruhi perekonomian pemerintah Thailand. Grafik di bawah ini akan menggambarkan bagaimana penurunan pengimporan udang yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ NOAA.-.U.S. IMPORTS OF SHRIMP (ALL TYPES) BY COUNTRY WITH COMPARISONS diunduh dari <https://www.st.nmfs.noaa.gov/apex/f?p=169:2:0::NO::>

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid.

Gambar 4.3 Grafik Data Impor *Shrimp* Amerika Serikat

Sumber: *U.S. IMPORTS OF SHRIMP (ALL TYPES) BY COUNTRY WITH COMPARISONS*⁹⁸

Apabila kita berbicara akan besarnya sektor industri *seafood* di Thailand, maka tidak terlepas juga akan betapa besarnya *force labour* yang berada didalamnya. Dalam artikel yang dikeluarkan oleh *The Guardian*, menjelaskan bahwa mereka telah menginvestigasi dan menemukan adanya perbudakan yang mengarah pada *force labour* di dalam kapal ikan Thailand yang mana hasil produk udangnya dijual di United Kingdom, Amerika Serikat dan Europe Union.⁹⁹ Selain itu, para pengungsi Rohingya diperjualkan melalui perkemahan dihutan yang mematikan untuk dijual kedalam sektor industri perikanan Thailand, dalam bentuk

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Kate Hodal, Annie Kelly, dan Dan Roberts. 2014. *US demotes Thailand and Qatar for abysmal human trafficking records* diunduh dari <https://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/20/thailand-qatar-downgraded-human-trafficking-report>

repository.ub.ac.id

force labour yang nantinya produk udang dan *seafood* mereka diperjual-belikan secara global di seluruh dunia.¹⁰⁰

Gambar 4.3 Kondisi Kapal Thailand yang digunakan untuk mengangkut udang



Berdasarkan testimoni dari korban yang selamat, makelar perdagangan manusia, dan aktivis grup hak asasi manusia mereka mengindikasikan adanya ratusan pria Rohingya yang di perjual-belikan dalam bentuk *force labour* didalam perkemahan memetakan yang diketahui letaknya berada di daerah selatan Thailand.¹⁰¹ Mereka juga mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan dan diketahui oleh beberapa aparat negara. Dalam beberapa kasus, para pengungsi Rohingya yang di tahan di pusat penahanan imigran di Thailand dibawa dengan paksa oleh staff dan diberikan kepada makelar yang nantinya akan dijual kepada awak kapal Thailand.¹⁰² Para migran Rohingya lainnya mengatakan bahwa para pejabat

¹⁰⁰ Emanuel Stoakes, Chris Kelly.2015.Revealed: how the Thai fishing industry trafficks, imprisons and enslaves <https://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/20/thai-fishing-industry-implicated-enslavement-deaths-rohingya>

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ibid.

Thailand, mengumpulkan mereka dari sebagai korban perdagangan manusia ketika mereka tiba di pesisir pantai Thailand. Lalu para pejabat tersebut membawa mereka ke perkemahan ditengah hutan di mana mereka ditahan untuk dimintai tebusan atau untuk dijual ke kapal nelayan sebagai tenaga budak.¹⁰³

Seafood industry milik Thailand diperkirakan memiliki keuntungan sebesar \$7.3 milyar pertahunnya, yang mana sebagian besar produknya diekspor keluar negeri.¹⁰⁴ Di tahun 2013, *The Guardian* melakukan sebuah investigasi melacak rantai pasokan udang yang diproduksi oleh para korban perdagangan manusia dalam bentuk *force labour* dalam *seafood industry* di Thailand. Dan rantai pasokan tersebut berhenti di jaringan supermarket besar di Inggris dan Amerika Serikat.¹⁰⁵ Melihat hak itu, Amerika Serikat sebagai negara pengimpor udang terbesar di Thailand, dan begitu pula sebaliknya Thailand merupakan negara pemasok udang terbesar di Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat pun mengambil tindakan.

Di tahun 2014, setelah dua tahun berturut-turut menduduki *tier 2 watchlist* dalam *TIP Report* yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat, Thailand pun akhirnya turun menjadi *tier 3*. Penurunan peringkat tersebut dapat menyebabkan ketegangan diplomatik antara kedua mitra politik dan perdagangan strategis tersebut, dan dapat mengakibatkan sanksi ekonomi dan hilangnya bantuan pembangunan untuk Thailand, yang juga mengakibatkan akan adanya *blacklist*

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

terhadap produk-produk kelautan dari Thailand.¹⁰⁶ Laporan juga tersebut mengutip adanya korupsi di semua tingkatan dalam pemerintahan Thailand yang mana merupakan menghambat adanya kemajuan yang signifikan dan mengklaim bahwa penegakan hukum *anti-trafficking* tidak membuat perubahan yang berarti.¹⁰⁷

Tidak hanya itu juga pemerintah Amerika Serikat di tahun 2015, memfokuskan pemberian dana bantuan yang dicantumkan dalam anggaran tahunan 2015 mereka, ke perbudakan di sektor perikanan dan prostitusi, dan perbudakan secara menyeluruh. Selain itu di bulan september lalu tahun 2016 pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan sebuah laporan khusus sebagai kepanjangan tangan dari laporan *Trafficking In Persons Report* yang di keluarkan di tahun 2016 ini. Laporan tersebut berjudul *TURNING THE TIDE: Harnessing Innovation and Partnerships to Combat Human Trafficking in The Seafood Sector*, yang mana berisi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah suatu negara dalam memerangi perdagangan manusia di *seafood industry*.

Dalam sebuah artikel yang di tulis oleh *The Guardian*, John. F. Kerry mengatakan bahwa dalam hal perdagangan manusia dalam bentuk *force labour* di bidang *seafood industry*, para pembeli (*consumers*) juga harus memiliki rasa tanggung jawab dalam memerangi perdagangan manusia yang terjadi. Ia mengatakannya dalam sebuah kalimat seperti ini "*It is for each of us to make sure*

¹⁰⁶ Kate Hodal, Annie Kelly, dan Dan Roberts.2014.*US demotes Thailand and Qatar for abysmal human trafficking records* diunduh dari <https://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/20/thailand-qatar-downgraded-human-trafficking-report>

¹⁰⁷ Ibid.

the goods we buy are free from forced labour".¹⁰⁸ Dimana merupakan tanggung jawab kita bersama apabila barang yang kita beli bukanlah suatu bentuk kepanjangan tangan dari *force labour*, dan juga kita juga bertanggung jawab dalam memerangi perdagangan manusia yang ada.

Maka apabila kita lihat adanya nilai transaksi dampak human trafficking Thailand terhadap Pemerintah Amerika Serikat, dimana dalam kasus ini adalah *force labour* di Thailand yang berada dalam sektor *seafood industry*. Karena hasil dari *force labour* tersebut berakhir di rak-rak supermarket besar di pasar Amerika Serikat, begitu juga dengan impor yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat dalam bidang udang yang merupakan salah satu bentuk dari produk dari *force labour*. Selain itu pula Amerika Serikat merupakan salah satu negara tujuan para pelaku perdagangan manusia.

Selain itu pula dibulan Oktober tahun 2016 lalu, pemerintah Amerika Serikat berhasil menangkap belasan korban *sex trafficking* di Amerika Serikat yang berasal dari Thailand.¹⁰⁹ Thailand juga merupakan negara ke-4 terbanyak dalam hal mengirim *human trafficking* ke Amerika Serikat, yang mana merupakan sebagian korban dari *human trafficking* yang berada di Amerika Serikat terjerumus kedalam beberapa jenis perdagangan manusia yaitu seks komersil dan perbudakan. Dalam hal perbudakan dapat berupa *force labour*, *domestic work*, atau perikanan.

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ The Guardian.2016.*Sex-trafficking ring forced hundreds of Thai women to 'live a nightmare' in US* diunduh dari <https://www.theguardian.com/law/2016/oct/05/sex-trafficking-ring-thai-women-us-arrests>

Dalam laporan tahunan pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Thailand menunjukkan tidak adanya upaya dalam memerangi perdagangan manusia. Di tahun 2014, pemerintah Thailand turun secara otomatis dari Tier 2 Watch List menjadi Tier 3. Di dalam laporan tersebut dituliskan, bahwa ditemukannya banyak keterlibatan antara aparat pemerintah dan perdagangan manusia di Thailand. Di laporan tersebut juga dituliskan bahwa minimnya data yang diberikan oleh pemerintah Thailand mengenai perdagangan manusia. Dengan adanya penurunan Tier menjadi Tier 3 maka mengakibatkan pemerintah Thailand untuk lebih berperan aktif dalam memerangi perdagangan manusia. Pemerintah Amerika dalam hal ini juga berperan sebagai salah satu *early warning* dalam hal perdagangan manusia.



BAB V

Upaya Diplomasi Pemerintah Amerika Serikat dalam Memerangi *Human Trafficking* di Thailand pada tahun 2013-2016

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai apa saja upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi *human trafficking* di Thailand. Pada fungsi *promotion*, Kishan memengambarkan bahwa dalam fungsi ini *the sending state* terkadang dapat mempromosikan negaranya dengan cara memberikan penawaran akan apa yang bisa ia berikan. Ia mencontohkan dalam bidang ekonomi dengan memberikan bantuan dalam bidang ekspor dan mempermudah dalam investasi asing.¹¹⁰

Dalam melihat fungsi ini penulis melihat aspek apa saja yang ditawarkan pemerintah Amerika Serikat untuk pemerintah Thailand. Pada bidang ekonomi, Amerika Serikat merupakan partner utama pemerintah Thailand dalam hal impor udang yang mana memberikan keuntungan besar setiap tahunnya bagi pemerintah Thailand, dana bantuan dari *U.S Agency For International Development*, dana bantuan dalam rangka memerangi perdagangan manusia dan dana bantuan yang berasal dari *Departement of State*.

Fungsi kedua *Outreach*, dijelaskan mengenai diplomasi memiliki fungsi untuk membuat konstitusi yang baik dan menambah *ally* yang dapat digunakan sebagai sumber informasi, jaringan, dan *accessing opportunities*.¹¹¹ *Outreach* juga

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Rana, Kishan S.2007.*Bilateral Diplomacy*. DiploFoundation; Belgrade

berarti bagaimana pemerintah Amerika Serikat menciptakan sarana dan metode yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah Thailand dalam mengambil suatu kebijakan. Pada fungsi ini, NGO dan media massa digunakan sebagai *ally* oleh pemerintah Amerika Serikat dalam mengumpulkan informasi dan dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah Thailand.

Dalam fungsi ketiga *feedback*, lebih mengacu kepada pada tugas dasar dari diplomasi yaitu reportasi, dapat berupa tulisan analisis, atau laporan diskusi dan juga dapat berupa rekomendasi kebijakan terhadap pemerintah Thailand.¹¹²

Feedback yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat berupa *TIP Report* yang berupa tulisan analisis dan laporan diskusi mengenai upaya pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia di Thailand.

Pemerintah Amerika Serikat juga melakukan beberapa investigasi terhadap perdagangan manusia di Thailand, sehingga ia dapat memberikan beberapa rekomendasi kebijakan terhadap perdagangan manusia yang terjadi di Thailand. Dalam hal ini pemerintah Amerika Serikat menurunkan Thailand di *Tier 3*, pemerintah Amerika Serikat juga menurunkan jumlah impor uang dari Thailand, mempersulit pemberian dana, dan menurunkan jumlah dana bantuan.

Dalam fungsi keempat *management*, merupakan tugas dari sistem operasi diplomasi yang mana dalam penelitian ini *TIP Office* yang berperan sebagai kantor pusat akan bertugas mengawasi kedutaan.¹¹³ Dalam tugasnya yaitu memerangi perdagangan manusia di Thailand. Maka dalam fungsi ini peran

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid*

representatif resmi dari pemerintah Amerika Serikat di Thailand sangatlah memiliki peran penting, yang mana merupakan peran penting dari *TIP Office*.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi isu *human trafficking* di Thailand dengan menggunakan fungsi diplomasi bilateral yang telah dijelaskan pada paragraf sebelum-sebelumnya. Hubungan diplomasi bilateral yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan Thailand sudah terjadi semenjak abad ke-18.¹¹⁴

Diawali oleh perjanjian persahabatan dan perdagangan di abad ke-18, kini diplomasi bilateral yang diantara kedua negara tersebut telah berkembang dengan seiring jalannya waktu, dengan ditandai adanya isu-isu kontemporer dan kerjasama keamanan yang dilakukan oleh kedua belah negara. Salah satu isu tersebut adalah *human trafficking*.

Pada dasarnya pemerintah Amerika Serikat menganggap bahwa perlunya upaya penanganan yang lebih gencar terhadap isu *human trafficking*. Maka dari itu pada tahun 2000 pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan *TVPA (Trafficking Victim Protection Act)* yang mana merupakan bentuk ratifikasi dari *The Palermo Protocol*.¹¹⁵ Menunjukkan keseriusannya dalam memerangi *human trafficking*, pemerintah Amerika Serikat pun menjadikan pemerangan akan *human trafficking* sebagai salah satu *foreign policy* yang dijalankan oleh pemerintah

¹¹⁴ Departement of State, USA.-. *Thailand-US Relations* diunduh dari <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2814.htm>

¹¹⁵ Diunduh dari <https://fightslaverynow.org/why-fight-there-are-27-million-reasons/the-law-and-trafficking/trafficking-victim-protection-act/trafficking-victim-protection-act/> pada 29 July 2016

Amerika Serikat. Selain itu pemerintah Amerika Serikat juga membentuk sebuah kantor yang berada di bawah *US Departement of states* yang bernama *The Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons (TIP Office)*.¹¹⁶

Selain itu pemerintah Amerika Serikat juga melakukan berbagai macam upaya diplomasi dalam memerangi *human trafficking* secara global dan internasional. Salah satunya adalah upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap *human trafficking* di Thailand pada tahun 2013-2016. Upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap *human trafficking* di Thailand akan di jelaskan melalui sub-bab – sub-bab yang akan di jabarkan dibawah ini.

5.1 Pemberian Dana Bantuan dan Kerjasama Impor sebagai Upaya Diplomasi Pemerintah Amerika Serikat

Pada fungsi *promotion*, Kishan memengambarkan bahwa dalam fungsi ini *the sending state* terkadang dapat mempromosikan negaranya dengan cara memberikan penawaran akan apa yang bisa ia berikan. Ia mencontohkan dalam bidang ekonomi dengan memberikan bantuan dalam bidang ekspor dan mempermudah dalam investasi asing.¹¹⁷ Dalam melihat fungsi ini penulis melihat aspek apa saja yang ditawarkan pemerintah Amerika Serikat untuk pemerintah Thailand. Pada bidang ekonomi, Amerika Serikat merupakan partner utama

¹¹⁶ Diunduh dari <http://m.state.gov/mc16465.htm>

¹¹⁷ Ibid.

pemerintah Thailand dalam hal impor udang yang mana memberikan keuntungan besar setiap tahunnya bagi pemerintah Thailand, dana bantuan dari *U.S Agency For International Development*, dana bantuan dalam rangka memerangi perdagangan manusia dan dana bantuan yang berasal dari *Departement of State*.

Dalam bidang ekonomi tentunya pemerintah Amerika Serikat memiliki peran besar. Amerika Serikat merupakan partner utama pemerintah Thailand dalam hal impor udang yang mana memberikan keuntungan besar setiap tahunnya bagi pemerintah Thailand. Amerika Serikat merupakan negara pengimpor udang nomor 1 di Thailand dengan total konsumsi udang sebesar 4,0 pounds/orang setiap tahunnya.¹¹⁸ Thailand juga merupakan pengekspor *seafood* terutama udang nomor satu di Amerika Serikat. Hal tersebut berjalan semenjak tahun tahun 1994-2012, grafik tersebut dapat dilihat kembali di bab sebelumnya. Ditahun 2012, pemerintah Amerika Serikat mengimpor udang dari pemerintah Thailand sebesar 135,401 ton.¹¹⁹ Yang mana jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat dalam mengimpor udang di tahun 2012, yang membuat pemerintah Thailand menjadi eksportir udang no 1 di Amerika Serikat pada tahun itu. Dan pada peringkat kedua susul oleh Ekuador dengan jumlah impor sebesar 81,403 ton, dan Indonesia di peringkat ketiga dengan total 74,077 ton.¹²⁰

¹¹⁸ Universities of Oregon State.2014.*Overview of the U.S. Seafood Supply* diunduh dari <http://www.seafoodhealthfacts.org/seafood-choices/overview-us-seafood-supply>

¹¹⁹ NOAA.-*U.S. IMPORTS OF SHRIMP (ALL TYPES) BY COUNTRY WITH COMPARISONS* diunduh dari <https://www.st.nmfs.noaa.gov/apex/f?p=169:2:0::NO::>

¹²⁰ *Ibid.*

Posisi Thailand sebagai pengeksport udang nomor 1 di Amerika Serikat pun tersingkirkan di tahun 2013, dimana Thailand menempati posisi kedua dan India menempati posisi pertama. India menempati posisi pertama dengan total ekspor 90,983 ton, Thailand turun menempati posisi kedua dengan adanya penurunan drastis akan jumlah impor udang yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat menjadi sebesar 83,499 ton.¹²¹ Indonesia menyusul sebagai pengeksport udang ketiga terbesar di Amerika Serikat pada tahun 2013 dengan jumlah 81,147 ton.¹²² Penurunan yang besar tersebut terjadi seiring ditemukannya banyak indikasi *force labor* dalam sektor *seafood industry* di Thailand, yang mengarah pada perdagangan manusia.

Penurunan tingkat impor udang pemerintah Amerika Serikat terhadap Thailand pun berlanjut pada tahun 2014 dimana Thailand turun menjadi peringkat ke 5 dalam sektor impor udang. Peringkat pertama ditempati India dengan jumlah 108,651 ton, disusul oleh Indonesia di peringkat ke dua dengan total 103,331 ton, Ekuador menempati peringkat ke tiga dengan total 92,345 ton, di peringkat ke empat ditempati oleh Vietnam dengan jumlah 73,151 ton, dan di peringkat kelima ditempati oleh Thailand dengan jumlah total 64,416 ton.¹²³

Turunnya Thailand menjadi peringkat ke lima dalam sektor ekspor udang di Amerika Serikat merupakan tindakan lanjutan dari pemerintah Amerika Serikat dalam menanggapi adanya perdagangan manusia di sektor *seafood*

¹²¹ Ibid.

¹²² Ibid.

¹²³ Ibid.

industry di Thailand. Selain itu pula turunnya peringkat Thailand sebagai negara pengekspor udang ke Amerika Serikat disertai dengan turunnya peringkat Thailand dalam laporan *TIP Report* yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Thailand mengalami penurunan peringkat dari Tier 2 Watch List menjadi Tier 3, dikarenakan tidak adanya upaya serius pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia.

Gambar 5.1 *Sorting fresh prawns at a fish market in Thailand*



Sumber: The Guardian¹²⁴

Seafood industry milik Thailand diperkirakan memiliki keuntungan sebesar \$7.3 milyar pertahunnya, yang mana sebagian besar produknya diekspor keluar negeri. Thailand merupakan pengekspor *seafood* terbesar didunia dan

¹²⁴ Reuters.2016. *US human trafficking report to upgrade Thailand, sources say* diunduh dari <https://www.theguardian.com/global-development/2016/jun/29/us-human-trafficking-in-persons-report-upgrade-thailand-sources-say>

penghasil udang terbesar pertama di dunia.¹²⁵ Dan Amerika Serikat merupakan negara pengimpor udang utama di Thailand. Dengan adanya penurunan jumlah impor udang yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan dengan merosotnya peringkat Thailand dalam sektor ekspor udang di Amerika Serikat hingga 64,416 ton pada tahun 2014, maka secara langsung berdampak akan perekonomian Thailand.

Maka dapat kita simpulkan bahwa sektor impor udang yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat merupakan suatu bentuk dari fungsi diplomasi yaitu *promotion*. Dimana Amerika Serikat memberikan penawaran dalam menjadikan Thailand sebagai partner utama dalam sektor impor udang yang berpengaruh dalam perekonomian Thailand. Hal tersebut akan terus berlanjut apabila Thailand serius dalam memerangi perdagangan manusia terutama dalam *seafood industry*. Namun, adanya perdagangan manusia dalam *seafood industry* dan tidak adanya upaya serius dari pemerintah Thailand dalam menangani hal tersebut, membuat pemerintah Amerika Serikat tidak lagi menjadikan Thailand sebagai partner utama. Yang mana hal tersebut berdampak pada perekonomian Thailand.

Selain itu, dalam fungsi *promotion* pemerintah Amerika Serikat setiap tahunnya memberikan dana bantuan yang berasal dari *U.S Agency For International Development* (USAID). Pada tahun 2013 pemerintah Thailand menerima dana bantuan senilai 3,321,032 juta USD, dengan alokasi dana

¹²⁵ Laura Villadiego.2016.*Thailand:Reclaiming Mangroves fo Shrimp Production* diunduh dari <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/08/thailand-reclaiming-mangroves-shrimp-production-160815131444765.html>

sebesar 400,000 USD dialokasikan kepada MTV EXIT Foundation, guna memerangi perdagangan manusia di Thailand.¹²⁶ Alokasi dana tersebut merupakan alokasi dana kedua terbesar pada tahun 2013, dimana yang menempati peringkat pertama adalah *Development Alternatives, Inc.* yang mana memiliki program utama untuk memperkuat sistem demokrasi di Thailand.¹²⁷

Pada tahun 2014 USAID memberikan dana bantuan sekitar 9,104,836 juta USD, yang mana sebagian besar dialokasikan pada *Development Alternatives, Inc.* Dengan program utama guna memperkuat sistem demokrasi pemerintahan Thailand, dengan alokasi dana sebesar 6,8 juta USD.¹²⁸ Yang mana pada tahun 2014, bertepatan dengan terjadinya kudeta yang dilakukan oleh pasukan junta militer Thailand. Dalam bidang memerangi perdagangan manusia pada tahun 2014, alokasi dana yang berikan oleh USAID kepada Thailand sebesar 374,000 USD.¹²⁹ Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah dana bantuan yang di alokasikan untuk kesehatan dan penyakit menular di Thailand yaitu sebesar 720,000 USD.¹³⁰

Jumlah dana bantuan yang diterima oleh pemerintah Thailand dari USAID pada tahun 2015 jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2014. Dimana di tahun 2015 total jumlah dana bantuan yang diberikan sebesar 3,325,478 juta

¹²⁶ USAID.2016.*U.S. Foreign Aid by Country* diunduh dari https://explorer.usaid.gov/cd/THA?implementing_agency_id=1&measure=Obligations&fiscal_year=2013

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

USD.¹³¹ Dengan fokus alokasi dana diberikan kepada Asia Foundation sebesar 1,1 juta USD, dengan program utama *Peace and Reconciliation Processes*.¹³² Perdagangan manusia merupakan program ketiga yang mana dana dari USAID dialokasikan. Program yang merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya yang bekerjasama dengan MTV EXIT mendapatkan alokasi dana sebesar 397,000 USD.¹³³

Ditahun 2016, USAID memberikan dana bantuan sekitar 5,200,408 USD.¹³⁴ Pada tahun ini seiring dengan naiknya peringkat pemerintah Thailand dalam *TIP Report 2016* dalam memerangi perdagangan manusia maka alokasi dana utama dan terbanyak jatuh pada program pemerangan perdagangan manusia. Program yang merupakan program lanjutan dari tahun sebelumnya yaitu EXIT (*End Exploitation and Trafficking*) kali ini bekerjasama dengan IOM (*International Organization for Migration*) mendapatkan alokasi dana sebesar 878 ribu USD.¹³⁵ Dapat kita lihat bahwa pemerintah Amerika Serikat memberikan dana bantuan kepada Thailand sebagai salah satu upaya pemerintah Amerika Serikat memerangi perdagangan manusia yang ada di Thailand.

Dan juga dalam memerangi perdagangan manusia pemerintah Amerika Serikat memeberikan dana bantuan yang berasal dari *Departement of State*. Yang mana, dana bantuan tersalurkan kedalam program-program memerangi

¹³¹ Ibid.

¹³² Ibid.

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ Ibid.

perdagangan manusia dengan bekerjasama dengan NGO-NGO yang ada di Thailand.

Pada tahun 2013, pemerintah Amerika Serikat memunyai satu program tahunan untuk Thailand yang mana terfokus pada kerjasama dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan eksploitasi migran. Dengan jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat sebesar 350 ribu USD, yang diberikan melalui *Solidarity Center*.

Sama seperti tahun sebelumnya kali ini pemerintah Thailand fokus akan satu program dalam menangani *human trafficking*. Program regional seperti penanganan *human trafficking* di aliran sungai mekong sudah tidak lagi menjadi program utama. Melainkan program domestik yang terfokus pada pencegahan dan perlindungan akan *human trafficking*. Sayangnya, di tahun 2015 dan 2016, pemerintah Amerika Serikat tidak memiliki program baru ataupun tambahan bagi pemerintah Thailand.

5.2 Penggunaan NGO dan Media dalam upaya Diplomasi Pemerintah Amerika Serikat

Outreach menjelaskan bagaimana diplomasi berfungsi untuk membuat konstitusi yang baik dan menambah *ally* yang dapat digunakan sebagai sumber informasi, jaringan, dan *accessing opportunities*.¹³⁶ Selain itu juga mengenai bagaimana pemerintah Amerika Serikat menciptakan sarana dan metode yang

¹³⁶ Rana, Kishan S. 2007. *Bilateral Diplomacy*. DiploFoundation; Belgrade

dapat mempengaruhi keputusan pemerintah Thailand dalam mengambil suatu kebijakan. Dalam melihat upaya diplomasi pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi perdagangan manusia di Thailand, pada fungsi ini pemerintah Amerika Serikat menggunakan NGO dan media massa digunakan sebagai *ally* oleh pemerintah Amerika Serikat dalam mengumpulkan informasi dan dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah Thailand.

a. NGO

Dalam mengumpulkan informasi dan menciptakan sarana yang dapat mempengaruhi pemerintah Thailand pemerintah Amerika Serikat melakukan kerjasama dengan *New Life Center Foundation* dan *Solidarity Center*. Kedua organisasi tersebut dijadikan pemerintah Amerika Serikat sebagai *ally* guna memperluas dan membentuk jaringan pemerintah Amerika Serikat dan menambah informasi dari pihak korban perdagangan manusia yang berada di Thailand. Dan juga menginvestigasi dan menyebarkan rasa *awereness* akan perdagangan manusia.

Tabel 5.1 Fiscal Year 2013

TAHUN 2013	
Country	Thailand
Implementer	Solidarity Center
Amount	\$350,000
Duration	24 months
Description	<i>Solidarity Center</i> akan meneruskan pembangunan J/TIP-project di Thailand dengan meneruskan memonitoring kasus <i>trafficking</i> , memfokuskan pada penambahan jumlah investigasi, pengusutan dan penghukuman bagi para pelaku <i>trafficking</i> . <i>Solidarity Center</i> membangun kerjasama sebagai partner dengan organisasi lokal dan akan melakukan berbagai macam aktivitas guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan eksploitasi pekerja migran.

Sumber: Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, Projects Funded During FY

2013¹³⁷

Pada tahun 2013, pemerintah Amerika Serikat memunyai satu program tahunan untuk Thailand yang mana terfokus pada kerjasama dalam rangka meningkatkan sedaran masyarakat akan eksploitasi migran. Jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam program tersebut sebesar 350 ribu USD, yang diberikan melalui *Solidarity Center*. *Solidarity Center* merupakan suatu organisasi pekerja terbesar yang berbasis di Amerika Serikat.¹³⁸ *Solidarity Center* bertujuan untuk membantu para pekerja didunia ditempatkan di dunia kerja yang aman dan sehat, dengan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, martabat dalam pekerjaan mereka dan keadilan di tempat kerja dan komunitas mereka.

¹³⁷ Departement of States.2014.*Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons: Projects Funded During Fiscal Year 2013* diunduh dari <http://www.state.gov/j/tip/rls/other/2013/215002.htm>

¹³⁸ Solidarity Center.-.*Who We Are* diunduh dari <http://www.solidaritycenter.org/who-we-are/>

Solidarity Center memiliki prinsip dasar bahwa para pekerja dapat meningkatkan pekerjaan dan situasi di tempat kerja mereka, menekan pemerintah mereka untuk menegakan hukum dan melindungi hak asasi manusia dan menjadi kekuatan bagi demokrasi, keadilan sosial dan berperan dalam pembangunan ekonomi inklusif.¹³⁹ Hal tersebut dapat terjadi dengan cara melaksanakan hak mereka dalam hal kebebasan berserikat dan membentuk serikat buruh dan juga membentuk organisasi hak pekerja yang demokratis. *Solidarity Center* yang didirikan pada tahun 1997 bekerjasama dengan berbagai kalangan demi mencapai tujuannya, ia juga menerima pemberian dana dari berbagai pihak, dan pemerintah Amerika Serikat merupakan salah satunya.

Program tersebut berjalan selama 2 tahun, yang mana terhitung dari tahun 2013 dan berakhir pada tahun 2015. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel di atas program tersebut bertujuan untuk memonitoring kasus perdagangan manusia, dengan melakukan investigasi, pengusutan dan penghukuman bagi para pelaku perdagangan manusia. *Solidarity Center* juga bekerjasama dengan organisasi lokal dalam melakukan berbagai aktivitas dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat akan adanya eksploitasi pekerja migran. Hal tersebut seiring dengan turunnya peringkat Thailand dalam *TIP Report* yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan terungkapnya kasus eksploitasi akan buruh migran di bidang *seafood industry*. Hal yang serupa juga dapat kita lihat pada tabel dibawah ini yang mana merupakan program kerjasama dan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan salah satu NGO, di tahun 2014;

¹³⁹ Ibid.

Tabel 5.2 Fiscal Year 2014

TAHUN 2014	
Country	Thailand
Implementer	New Life Center Foundation
Amount	\$115,977
Duration	36 months
Description	Dengan support yang berlanjut, <i>New Life Center Foundation</i> akan melanjutkan upaya pencegahan dan perlindungan akan populasi suku pedalaman yang ada di Thailand. Aktivitas dalam bidang pencegahan adalah pendidikan (termasuk pelatihan bahasa Thai, hak asasi, dan hukum pekerja), <i>life skill</i> , dan pelatihan vokasi. Di bidang perlindungan <i>New Life Center Foundation</i> menyediakan penampungan korban perdagangan, pelayanan kesehatan fisik dan mental, pendidikan formal dan informal, pelatihan vokasi, aktivitas terapi, dan bantuan reintegrasi.

Sumber: Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, Projects Funded During FY

2014¹⁴⁰

Sama seperti tahun sebelumnya kali ini pemerintah Amerika Serikat fokus akan pemberian satu program dalam menangani perdagangan manusia. Program regional seperti penanganan perdagangan manusia di aliran sungai mekong sudah tidak lagi menjadi program utama. Namun tidak berarti pemerintah Amerika Serikat tidak peduli terhadap perdagangan manusia di yang berpotensi terjadi di aliran sungai mekong. Pada tahun 2014, pemerintah Amerika Serikat melakukan kerjasama dengan *New Life Center Foundation* yang mana merupakan sebuah yayasan yang bekerja secara eksklusif dengan wanita yang berasal dari etnis minoritas di daerah sub-region Mekong.¹⁴¹

Seperti yang dapat kita lihat di tabel di atas, pemerintah Amerika Serikat memberikan dana bantuan sebesar 115,977 USD, guna pencegahan dan

¹⁴⁰ Departement of States.2015. *Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons: Projects Funded During Fiscal Year 2014* diunduh <http://www.state.gov/j/tip/rls/other/2014/233654.htm>

¹⁴¹ New Life Center Foundation. - *About The New Life Center Foundation* diunduh dari <http://www.newlifecenterfoundation.org/about-new-life-center-foundation.html>

perlindungan akan populasi suku pedalaman yang ada di Thailand yang terancam rentan akan perdagangan manusia. Dalam hal pencegahan adalah *New Life Center Foundation* memberikan pendidikan berupa pelatihan bahasa Thai, hak asasi, hukum pekerja, life skill, dan pelatihan vokasi.

Dan dalam hal perlindungan mereka menyediakan tempat penampungan untuk korban perdagangan, pelayanan kesehatan fisik dan mental, pendidikan formal dan informal, pelatihan vokasi, aktivitas terapi, dan bantuan reintegrasi. Program tersebut berjalan selama 36 bulan atau 3 tahun. Sayangnya, di tahun 2015 dan 2016, pemerintah Amerika Serikat tidak memiliki program baru ataupun tambahan bagi pemerintah Thailand.

b. Media Massa

Pemerintah Amerika Serikat bekerja sama dengan beberapa media massa baik milik Amerika Serikat maupun salah satu media massa milik Inggris yang gencar menyelidiki tentang apa yang terjadi dengan perdagangan manusia pada di Thailand. Di bulan juni tahun 2014, sebuah media massa milik Amerika Serikat mereview mengenai *TIP Report* yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada bulan yang sama yaitu Juni 2014. Dituliskan bahwa dalam laporan tersebut peringkat Thailand turun dari *Tier 2 Watch List* menjadi *Tier 3*, dikarenakan ditemukannya puluhan dari ribuan migran yang berasal dari negara-negara tetangga

Thailand yang tereksplorasi dalam industri seks komersil, didalam perahu perikanan atau sebagai pelayan rumah. ¹⁴²

Selain itu pula, di tahun yang sama terdapat artikel mengenai bagaimana perdagangan manusia di Thailand. Artikel tersebut menceritakan kembali cerita Myo (korban perdagangan manusia asal Myanmar) yang menjadi korban *force labour* dalam industri perikanan di Thailand. ¹⁴³ Didalam artikel tersebut juga dijelaskan bahwa prostitusi dan perbudakan di laut (perbudakan dalam industri perikanan) merupakan dua bentuk perdagangan manusia yang paling besar yang sering ditemui di Thailand. Dalam hal prostitusi, tidak diketahui berapa jumlah korban wanita dan anak-anak dalam jumlah yang pasti, namun suatu organisasi non-profit menyatakan bahwa jumlah korban dapan melebihi puluhan ribu anak-anak dan wanita. ¹⁴⁴

Dalam artikel tersebut juga menjelaskan bahwa ILO (*International Labor Organizations*) menemukan bahwa 17% dari 600 nelayan di Thailand bekerja tidak berdasarkan kehendak mereka dan mereka tidak diijinkan untuk pulang dengan menggunakan ancaman baik finansial, kekerasan maupun hukum. ¹⁴⁵ Selain itu juga dijelaskan bahwa adanya korupsi yang mengakar dan menyebar di sistem pemerintahan dan sistem hukum Thailand merupakan salah satu penghambat pemerintah Thailand dalam memerangi

¹⁴² Leif Coorlim.2014.*U.S. Human Trafficking Report Drops Four Nations to Lowest Tier* diunduh dari <http://edition.cnn.com/2014/06/20/us/human-trafficking-report/index.html>

¹⁴³ Sophie Brown.2014.*Tackling Thailand's Human Trafficking Problem* diunduh dari <http://edition.cnn.com/2014/06/20/world/asia/thailand-trafficking-report/>

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Ibid.

perdagangan manusia. Artikel tersebut juga menyebutkan akan betapa rapuhnya keberadaan pengungsi Rohingya di Thailand, di tengah-tengah perdagangan manusia yang semakin marak dan di dukung dengan aparat pemerintahan dan aparat hukum yang terlibat dengan kasus korupsi.

CNN memberikan beberapa informasi penting mengenai perdagangan manusia yang ada di Thailand. Pada bulan Mei 2015, sebuah artikel dikeluarkan CNN yang merupakan hasil investigasi dari CNN. Menjelaskan mengenai kondisi mengerikan para korban perdagangan manusia dalam bidang *seafood industry* di Thailand. Beberapa dari mereka mengalami kekerasan dan penyiksaan fisik yang menyebabkan kerusakan permanen. Awalnya mereka dijebak dengan akan dijanjikan pekerjaan yang bagus, namun berakhir sebagai budak di kapal perikanan. CNN memperkirakan adanya 3000 korban perdagangan manusia yang masih terdapat diatas kapal di laut.¹⁴⁶ Tidak hanya CNN yang terlibat dalam media promosi Amerika Serikat namun New York Times juga memberikan berita yang sama dengan CNN dengan penekanan pada kasus *force labour* dibidang industri perikanan di Thailand.¹⁴⁷

Tidak hanya media Amerika Serikat namun media milik Inggris yaitu The Guardian dengan gencar memantau dan memberikan informasi mengenai perdagangan manusia yang terjadi di Thailand. Dibulan July

¹⁴⁶ Dean Irvine, Saima Mohsin, dan Kocha Olarn.2015.*Seafood from slavery: Can Thailand tackle the crisis in its fishing industry?* Didunduh dari <http://edition.cnn.com/2015/05/11/asia/freedom-project-thailand-fishing-slave-ships/>

¹⁴⁷ David Moll.2014.*U.S.Gives Thailand and Malaysia Lowest Grade on Human Trafficking* diunduh dari https://www.nytimes.com/2014/06/21/world/asia/us-gives-thailand-and-malaysia-lowest-grade-on-human-trafficking.html?_r=1

tahun 2015, The Guardian yang merupakan salah satu media massa milik Inggris menguak perdagangan manusia yang terjadi di Thailand yang berada didalam sektor industri perikanan di Thailand. Dalam artikel tersebut dijelaskan mengenai migran Rohingya yang di jual melalui sebuah perkemahan memamatkan di tengah hutan Thailand untuk nantinya dijual sebagai budak dalam industri *seafood* di Thailand.¹⁴⁸

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh The Guardian dalam artikel tersebut diketahui adanya keterlibatan dari pejabat tinggi Thailand dan juga aparat militer Thailand dalam perdagangan manusia. Yang mana mereka sering menerima suap dari para oknum pelaku, atau bahkan terlibat langsung dalam perdagangan manusia tersebut.¹⁴⁹ Dimana mereka menahan para immigran untuk dijual.

Berdasarkan artikel tersebut juga diketahui bahwa *seafood industry* Thailand memiliki keuntungan sebesar \$7,3 miliar setiap tahunnya, yang mana sebagian besar produknya merupakan produk ekspor.¹⁵⁰ Inverstigasi yang dilakukan oleh The Guardian pun tidak berhenti sampai disitu. The guardian dalam artikel yang sama juga berhasil melacak kemana produk *seafood* Thailand diekspor, yang mana berujung pada pasar-pasar di Uni-Eropa dan Amerika Serikat.¹⁵¹

¹⁴⁸ Emanuel Stoakes dan Chris Kelly.2015.*Revealed: how the Thai fishing industry trafficks, imprisons and enslaves* diunduh dari <https://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/20/thai-fishing-industry-implicated-enslavement-deaths-rohingya>

¹⁴⁹ Ibid.

¹⁵⁰ Ibid.

¹⁵¹ Ibid.

The Guardian juga menjelaskan bahwa sebagian besar dari produk yang di ekspor ke pasar-pasar di Uni-Eropa dan Amerika Serikat merupakan hasil dari perdagangan manusia di bidang *seafood industry* (khususnya *shrimp/prawn*) di Thailand.¹⁵² Yang mana beberapa dari mereka ialah warga negara Myanmar yaitu migran Rohingya yang bertujuan mencari *asylum* ke Thailand namun berakhir dalam rantai perdaangan manusia.

Media-media tersebut juga menakankan bahwa Thailand merupakan negara pengekspor *seafood* terbesar ke-3 diseluruh dunia, dan Thailand merupakan pengekspor *seafood* pertama dan terbesar di Amerika Serikat hingga tahun 2013 lalu. Dan sebagian besar produk *seafood* Thailand seringkali berakhir di pasar-pasar di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Yang mana secara tidak langsung menunjukkan bahwa akibat dampak import *seafood* dari Thailand dapat memperbesar perdagangan manusia yang terjadi di sektor industri *seafood*.

Mereka juga menunjukkan akan *sex trafficking* yang melibatkan perempuan dan anak yang kini sudah dianggap begitu “biasa” di Thailand, mereka juga menunjukkan *force labour* dibidang industri perikanan di Thailand yang begitu besar hingga memakan korban jiwa dan memanfaatkan para pengungsi Rohingya.¹⁵³ Korupsi yang terjadi di kalangan pemerintahan dan aparat kewan Thailand juga tidak lepas dari sorotan media. Pemerintah Amerika Serikat pun bekerjasama dengan Inggris dalam hal menggambarkan perdagangan manusia yang terjadi di Thailand.

¹⁵² Ibid.

¹⁵³ Ibid.

Media massa milik Inggris pun dengan gencar melakukan pemberitaan terhadap perdagangan manusia di Thailand.

Maka dapat kita simpulkan dalam fungsi *outreach* ini, pemerintah Amerika Serikat menggunakan media massa seperti The Guardian, New York Times, dan CNN sebagai *ally* dalam menambah informasi mengenai perdagangan manusia di Thailand.

5.3 Pembuatan Laporan Terkait dalam Rangka Pemerangan Human Trafficking

Dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya diplomasi pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi perdagangan manusia di Thailand, pada sub-bab ini penulis akan melihat *TIP Report* yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat setiap tahunnya sebagai bentuk dari *feedback*. *Feedback*, mengacu pada tugas dasar dari diplomasi yaitu reportasi yang dapat berupa tulisan analisis, atau laporan diskusi dan juga dapat berupa rekomendasi kebijakan terhadap pemerintah Thailand.¹⁵⁴

Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2000 mendirikan sebuah kantor yang bernama *TIP Office* yang berada dibawah *US Departement of States*. *TIP Office* memiliki sebuah program internasional yang melibatkan 190 negara di dunia. Setiap tahunnya terhitung dari tahun 2001 hingga 2016, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan sebuah laporan yang berisikan bagaimana negara-negara di dunia dalam upayanya memerangi perdagangan manusia. Laporan

¹⁵⁴ Rana, Kishan S.2007.*Bilateral Diplomacy*. DiploFoundation; Belgrade.

tersebut ialah *Trafficking in Persons Report (TIP Report)*. *TIP Report* merupakan bentuk dari *feedback* yang diberikan pemerintah Amerika Serikat dalam melihat bagaimana upaya pemerintah Thailand memerangi perdagangan manusia. Dalam setiap *TIP Report* yang dikeluarkan setiap tahunnya pemerintah Amerika Serikat menekankan akan pentingnya memerangi perdagangan manusia.

Pemerintah Amerika Serikat menganggap bahwa perdagangan manusia merupakan sebuah serangan yang fatal bagi suatu negara dibanding kejatuhan suatu negara. Dan juga perdagangan manusia merupakan sebuah serangan bagi kebebasan dasar dan merupakan pelanggaran besar bagi hak asasi manusia. Perdagangan manusia juga sebuah ancaman yang mengancam segala kalangan, baik wanita, pria, anak-anak, orang dewasa, hingga orang tua. Dalam *TIP Report* tersebut, pemerintah Amerika Serikat memiliki standard kebijakan yang digunakan sebagai parameter keberhasilan upaya suatu negara dalam memerangi perdagangan manusia. Yaitu, *TVPA* yang merupakan kebijakan *anti-trafficking* Amerika Serikat, dengan kebijakannya yang bertumpu pada 3P dan juga *minimum standard*. Kebijakan *TVPA* yang bertumpu pada 3P terdiri dari *prosecution*, *protection*, dan *prevention*.¹⁵⁵

Minimum standard yang dimiliki pemerintah Amerika Serikat didalam laporan tersebut, nantinya akan menunjukkan bagaimana keseriusan upaya suatu negara dalam menangani perdagangan manusia. Hal tersebut juga nantinya yang akan menentukan peringkat suatu negara dalam *TIP Report*. *Minimum standards*

¹⁵⁵ Diunduh dari <https://fightslaverynow.org/why-fight-there-are-27-million-reasons/the-law-and-trafficking/trafficking-victim-protection-act/trafficking-victim-protection-act/> pada 29 July 2016

adalah sebuah standar yang ditentukan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam menilai upaya sebuah negara dalam memerangi perdagangan manusia¹⁵⁶ *Minimum Standards* juga digunakan pemerintah Amerika Serikat sebagai undang-undang dalam memerangi perdagangan manusia.¹⁵⁷ Berikut merupakan *minimum standards* yang seharusnya dilakukan suatu negara:

1. Pemerintah suatu negara harus melakukan pelarangan keras dan pemberian hukuman terhadap berbagai bentuk dari perdagangan manusia.
2. Pemerintah harus membuat suatu hukuman yang sepadan untuk diberikan bagi para pelanggar perdagangan manusia yang sesuai dengan bentuk perdagangan manusia apa yang para pelanggar lakukan.
3. Hukuman tersebut harus bersifat tegas dan jelas.
4. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani *human trafficking* harus menunjukkan keseriusannya dan bersifat berkelanjutan.

Selain keempat hal tersebut *minimum standard* juga menetapkan tujuh kriteria tambahan yang merupakan bahan pertimbangan dari indikasi poin keempat yaitu “upaya serius yang diberikan oleh pemerintah dan memiliki sifat yang berkelanjutan dalam menangani *human trafficking*”.¹⁵⁸ Berikut merupakan ketujuh kriteria tersebut:

¹⁵⁶ Departement of State, USA.2001. *Trafficking in Person Report 2001*

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

1. Apakah pemerintah menyelidiki dan mengusut kasus *human trafficking* di negaranya dengan seksama.
2. Apakah pemerintah memberikan perlindungan terhadap korban dari *human trafficking*, memberikan dukungan dan bantuan dalam menginvestasi dan mengusut kasus, memberikan bantuan hukum (seperti pengacara, dan lain sebagainya) untuk mengurus penghapusan retribusi atau guna menghadapi kesulitan hukum, dan yang terakhir, memastikan bahwa korban tidak akan dikenakan sanksi untuk tindakan yang melanggar hukum sebagai akibat langsung dari *human trafficking*.
3. Apakah pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti sosialisasi kepada publik, guna mencegah terjadinya *human trafficking*.
4. Apakah pemerintah telah bekerjasama dengan pemerintah lain dalam menyelidiki dan mengusut *human trafficking*.
5. Apakah pemerintah telah melakukan ekstradisi bagi para pelaku pelanggaran *human trafficking* seperti pemerintah mengekstradisi kejahatan berat lainnya.
6. Apakah pemerintah telah melakukan monitoring dalam hal imigrasi dan emigrasi guna melihat pola bukti dari *human trafficking*, dan apakah para penegak hukum memberikan respon yang pantas dan tepat.

7. Apakah pemerintah melakukan penyelidikan, mengusut dan mengambil segala langkah yang tepat terhadap pejabat publik yang terlibat dalam *human trafficking* secara seksama dan penuh semangat.

Kebijakan tersebut juga memiliki 3 faktor tambahan lainnya yang juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Amerika Serikat dalam menilai apakah sebuah negara tersebut memberikan upaya yang signifikan dalam memenuhi *minimum standards* yang telah ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat.¹⁵⁹ Ketiga faktor pertimbangan tersebut adalah:

1. Tingkat *human trafficking* dalam negeri.
2. Tingkat ketidakpatuhan pemerintah dengan *minimum standard*, khususnya sejauh mana pejabat pemerintahan terlibat dalam kasus *human trafficking*.
3. Langkah-langkah apa yang wajar untuk membuat pemerintah menjadi memenuhi *minimum standards* dalam memberikan sumber informasi dan kapabilitas pemerintah setempat.

Apabila suatu negara sudah memenuhi *minimum standard* dalam memerangi *human trafficking* sesuai dengan *US Anti-Trafficking Laws*, maka negara tersebut akan ditempatkan dalam Tier 1.¹⁶⁰ Sementara Tier 2, adalah suatu kondisi dimana negara tidak sepenuhnya memenuhi aturan yang sesuai dengan *US Anti-Trafficking Laws* dalam menangani dan memerangi *human trafficking*,

¹⁵⁹ Ibid.

¹⁶⁰ Departement of State, USA.2016. *Trafficking in Person Report 2016*

namun memiliki niat dan kemauan untuk memenuhinya.¹⁶¹ Dan Tier 2 Watch List, adalah negara yang berusaha memerangi perdagangan manusia dengan memenuhi upaya atau aturan dalam *US Anti-Trafficking Law*, tetapi masih menghadapi tantangan yang signifikan dan apabila negara tersebut secara terus menerus berada di Tier 2 Watch List maka secara otomatis ia akan jatuh di peringkat terakhir.¹⁶²

Terakhir adalah Tier 3, yang memiliki definisi sebuah negara yang dalam memerangi *human trafficking* tidak memenuhi standar yang ada dalam *US Anti-Trafficking Laws*. Apabila suatu negara berada di peringkat ini maka ia akan dikenakan sanksi oleh pemerintah Amerika Serikat. Sanksi tersebut berupa pengurangan atau pemberhentian pemberian dana bantuan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam bidang edukasi dan budaya, dan juga pemerintah Amerika Serikat dapat memberikan *vote* untuk mempersulit pemberian dana pinjaman dari bank pembangunan IMF.¹⁶³

TIP report ditulis berdasarkan hasil diskusi dengan pemerintah negara setempat, NGO-NGO lokal, badan imigrasi, dinas kepolisian, jurnalis, dan korban dari *human trafficking* itu sendiri.¹⁶⁴ Dan rekomendasi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap perdagangan manusia yang terjadi di Thailand berasal dari investigasi-investigasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Beberapa negara yang tidak masuk dan tidak dilibatkan dalam

¹⁶¹ Ibid.

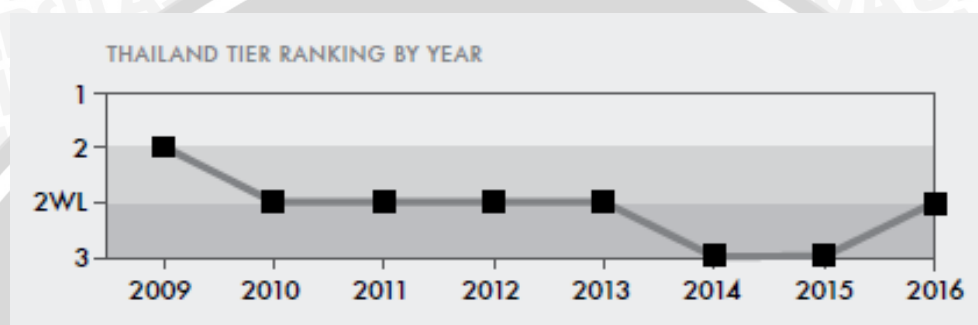
¹⁶² Ibid.

¹⁶³ Ibid

¹⁶⁴ Departement of State, USA.2001.*Trafficking in Person Report 2001*

dalam program ini dikarenakan adanya kekurangan dalam bidang informasi, dimana informasi akan *human trafficking* yang terjadi di negara tersebut tidak relevan.¹⁶⁵ Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal. *TIP Report* dikeluarkan setiap bulan Juni setiap tahunnya.

Grafik 3. Peringkat Thailand dalam memerangi *human trafficking* periode 2009-2016



Sumber: *TIP Report 2016, Departement of State of USA*¹⁶⁶

Di tahun 2009 peringkat Thailand di Tier 2 tidak bisa dipertahankan oleh pemerintah Thailand. Seperti yang dapat kita lihat pada grafik di atas, terjadi penurunan yang signifikan yang dimulai dari tahun 2010 hingga pada akhirnya Thailand menduduki peringkat terendah yaitu Tier 3 ditahun 2014-2015. Pada tahun 2010, Thailand turun menjadi peringkat Tier 2 Watch List, dikarenakan tidak adanya upaya pemerintah Thailand yang signifikan dalam mengatasi kerja paksa dan prostitusi paksa migran asing dan warga Thailand.¹⁶⁷ Selain itu juga dengan adanya korupsi didalam pemerintahan Thailand membuat sulitnya melacak penyelidikan dan pengusutan setiap kasus perdagangan manusia yang terjadi.

¹⁶⁵ Ibid

¹⁶⁶ Ibid. hal. 366

¹⁶⁷ Departement of State, USA.2010.*Trafficking in Person Report 2010*

Peringkat pemerintah Thailand pun terus menurun hingga akhirnya di tahun 2014, Thailand diturunkan secara otomatis menjadi Tier 3. Hal tersebut dikarenakan ditemukannya bukti bahwa adanya keterlibatan dari pihak pemerintah Thailand dalam perdagangan manusia. Dalam hal ini adalah penegak hukum yang bekerjasama dengan negara seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja dalam melakukan *human trafficking*.¹⁶⁸ Selain itu juga ditemukannya adanya indikasi eksploitasi yang mengarah kepada *human trafficking* dalam perikanan Thailand, dan tidak adanya upaya pemerintah Thailand untuk melakukan investigasi lebih lanjut.¹⁶⁹

Setiap tahunnya laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat memiliki tema-tema tertentu yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Pada tahun 2014, *TIP Report* memiliki tema mengenai *The Journey from Victim to Survivor*.¹⁷⁰ Yang mana berisikan cerita-cerita narasi dan deskripsi dari para korban selamat dari perdagangan manusia. Dan pada tahun 2015, sebagai sebuah bentuk keprihatinan pemerintah Amerika Serikat terhadap begitu besar dan banyaknya korban perdagangan manusia di sektor *force labour* di dunia, di tahun itu bertemakan perdagangan manusia di pasar global. Hal itu sangat bertepatan dimana di tahun sebelumnya yaitu 2014, pemerintah Amerika Serikat menemukan adanya indikasi perdagangan manusia dalam bentuk *force labour* di dalam industri perikanan Thailand yang memprihatinkan. Dan di tahun 2015 pula,

¹⁶⁸ Departement of State, USA.2014.*Trafficking in Person Report 2014*

¹⁶⁹ Ibid

¹⁷⁰ Departement of State, USA.2014.*Trafficking in Person Report 2014*

bersamaan dengan turunnya peringkat Thailand secara otomatis dalam *TIP Report* dari *Tier 2 Watch List* menjadi *Tier 3*.

Di tahun 2016, tema yang diusung oleh pemerintah Amerika Serikat dalam *TIP Report* adalah bahwa perdagangan manusia ialah suatu hal yang tak terelakan.¹⁷¹ Perdagangan manusia dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja, entah itu orang-orang disekitar kita, atau pada orang-orang terdekat kita. Fokus dari laporan tahun 2016, ialah dimana pemerintah Amerika Serikat melihat upaya apa saja yang dilakukan oleh para pemerintah negara-negara didunia dalam mencegah terjadinya perdagangan manusia.¹⁷² Ditekankan juga bahwa kunci utama dari pencegahan terjadinya perdagangan manusia ialah dengan belajar dari pengalaman yang terjadi dari korban yang selamat.



¹⁷¹ Departement of State, USA.2016.*Trafficking in Person Report 2016*

¹⁷² *Ibid.*

Gambar 5.2 Sex Trafficking in Thailand



Sumber: *Trafficking in Person Report 2014*¹⁷³

Gambar diatas merupakan seorang gadis muda yang menunggu pelanggan di pinggir jalan di Bangkok, Thailand. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya perempuan dan wanita baik dari dalam Thailand maupun yang berasal dari negara tetangga, yang terjebak dalam *sex trafficking*. Yang mana merupakan suatu hal yang biasa di temui di Thailand, umumnya mereka termasuk kedalam pariwisata seks komersil di Thailand. Seks komersil di Thailand merupakan bentuk dari perdagangan manusia terbesar ke-dua yang terdapat di Thailand. Sementara yang menempati posisi pertama adalah *force labour*. Yang mana menuju pada cerita dari korban selamat kedua di Thailand.

¹⁷³ Departement of State, USA.2014.*Trafficking in Person Report 2014*

Di tahun yang sama yaitu 2014, dalam *TIP Report* diceritakan mengenai kondisi memprihatinkan Myo. Myo merupakan warga negara Myanmar yang bermigrasi ke Thailand dengan tujuan bekerja untuk pabrik nanas di Thailand, namun Myo berakhir menjadi korban perdagangan manusia.¹⁷⁴ Dimana ia dijual kepada kapten kapal perikanan dan diberlakukan sebagai budak, dipaksa bekerja dan dipukuli. Aparat kepolisian pun yang melihat hal tersebut di dermaga tidak berbuat apa-apa karena suap yang telah diterima oleh mereka. Myo pun berhasil melarikan diri dan kini ia menjadi tuli dikarenakan penyiksaan yang dilakukan diatas kapal, kepalanya di benturkan berkali-kali pada balok es.¹⁷⁵

Dalam laporan tahun 2015 yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat tidak hanya menyoroti perdagangan dalam bentuk *force labour* namun juga memfokuskan pada *sex trafficking* yang ada di Thailand. Dimana di temukan gadis-gadis dari Malaysia, Myanmar, Laos dan Kamboja yang mana merupakan korban dari *sex trafficking*.¹⁷⁶ Selain itu aparat pemerintahan yang korup juga tak lepas dari faktor perdagangan manusia di Thailand. Yang mana di temui pada tahun 2015, terdapat beberapa aparat yang terlibat dalam perdagangan manusia dengan menjual pengungsi Rohingya.

Cerita-cerita tersebut membuktikan bahwa pentingnya dalam memerangi perdagangan manusia, karena perdagangan manusia merupakan kejahatan yang mengancam hak asasi manusia. Dalam setiap laporannya pemerintah Amerika Serikat juga menekankan bahwa suatu negara tidak dapat menangani perdagangan

¹⁷⁴ Ibid.

¹⁷⁵ Ibid.

¹⁷⁶ Departement of State, USA.2015. *Trafficking in Person Report 2015* hal.331

manusia itu sendirian. Karena perdagangan manusia merupakan suatu kejahatan yang melintasi batas yang mana diperlukan bekerjasama dengan negara lain.

Pemerintah Amerika Serikat juga menggambarkan betapa besar dan memprihatikannya perdagangan manusia di Thailand dalam bentuk *force labour* di bidang industri perikanan. Di tahun 2014, dalam laporannya pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa terdapat 57% dari 430 pekerja dari Myanmar yang berada di Thailand yang diidentifikasi mengalami kondisi perdagangan manusia.¹⁷⁷ Selain itu pula, terdapat para pekerja dari Kamboja yang ditemukan disektor perikanan di Thailand yang mengalami kondisi perdagangan manusia. Dan dengan terlibatnya aparat militer dan keamanan dan juga pejabat tinggi Thailand dalam menangani perdagangan manusia membuat perdagangan manusia yang ada di Thailand meningkat dan memprihatinkan.

Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa perlunya Thailand menangani perdagangan manusia yang terjadi di dalam negaranya. Pemerintah Amerika Serikat menekankan akan pentingnya peran pemerintah setempat dalam memerangi perdagangan manusia. Didalam laporan tersebut juga menyebutkan bahwa walaupun pemerintah tidak dapat menarik kembali apa yang telah terjadi pada korban perdagangan manusia, namun pemerintah dapat membantu mereka memulihkan diri dengan menyediakan bantuan kepada setiap korban perdagangan manusia.¹⁷⁸

Apabila kita menganalisis lebih baik lagi maka dapat kita simpulkan bahwa *TIP Report* merupakan sarana dan metode yang berhasil dalam mempengaruhi

¹⁷⁷ Ibid. Hal 373

¹⁷⁸ Departement of State, USA.2014. *Trafficking in Person Report 2014* hal. 7

kebijakan pemerintah Thailand tanpa terkesan intervensi. Hal itu tidak lain didukung dengan adanya pemberian sanksi apabila suatu negara menduduki peringkat *Tier 3* dimana tidak memenuhi standar minimum yang diberikan pemerintah Amerika Serikat yang mana mau tidak mau, pemerintah Thailand harus memenuhi standar minimum tersebut agar terhindar dari sanksi yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Untuk melihat dampak dari upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat terhadap upaya pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia di Thailand dapat di lihat di sub-bab sebelum-sebelumnya.

Dalam pemberian rekomendasi kebijakan pemerintah Amerika Serikat membedakannya kedalam tiga jenis yaitu *prevention*, *protection*, dan *prosecution*.¹⁷⁹ Hal tersebut secara detail dipaparkan pemerintah Amerika Serikat dalam laporannya. Rekomendasi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat berdasarkan akan kasus yang terjadi di Thailand, sehingga rekomendasi tersebut relevan dan dapat diaplikasikan oleh pemerintah Thailand. Keputusan Amerika Serikat dalam mengurangi pasokan impor udang dari pemerintah Thailand, juga berdasarkan adanya investigasi atas banyaknya pekerja di sektor *seafood industry* yang menjadi korban perdagangan manusia. Maka dapat disimpulkan dalam fungsi ini, pemerintah Amerika Serikat menggunakan *TIP Report* sebagai bentuk dari *feedback* yang mana menentukan setiap kebijakan yang nantinya diambil dalam melihat upaya pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia.

¹⁷⁹ Departement of State, USA.2014. *Trafficking in Person Report 2014*

5.4 Penggunaan TIP Office dalam Memantau Human Trafficking di Thailand

Dalam fungsi *management*, memfokuskan kepada peran TIP Office dalam upaya memerangi perdagangan manusia di Thailand. Dalam rangka memerangi perdagangan manusia secara global, pemerintah Amerika Serikat mendirikan *Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons (TIP Office)* yang berdiri didalam *Department of State* yang tepatnya termasuk kedalam *Secretary for Civilian Security, Democracy and Human Rights*, dan dibawah pimpinan dari Duta Besar untuk *Monitor and Combat Trafficking in Persons*.¹⁸⁰ TIP Office bekerjasama dengan pemerintah berbagai negara, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor privat guna mengembangkan dan menerapkan strategi untuk memerangi perdagangan manusia yang efektif.

Selain itu, TIP office juga bertanggung jawabakan diplomasi bilateral dan multilateral, penargetan bantuan asing, dan adanya keterlibata publik dalam hal memerangi perdagangan manusia.¹⁸¹ TIP Office sendiri dibagi menjadi empat bagian *Reports and Political Affairs, International Programs, Public Engagement*, dan *Resource Management and Planning*.¹⁸² *Reports and Political Affairs* memiliki peran untuk melibatkan pemerintah negara lain mengenai perdagangan manusia dna mempersiapkan *TIP Report* yang dikeluarkan setiap

¹⁸⁰ Anonymous.-.*About Us* diunduh dari <https://www.state.gov/j/tip/about/index.htm>

¹⁸¹ Ibid.

¹⁸² Ibid.

tahunnya. Setiap tahunnya mereka bertemu dengan para pejabat dan pemerintah negara lain untuk meningkatkan pendekatan 3P, mengukur kemajuan dalam upaya peningkatan *anti-human trafficking*, dan mengidentifikasi tren perdagangan manusia.¹⁸³

TIP Report yang dikeluarkan oleh *TIP Office* merupakan suatu alat diplomatik dan diagnosis pemerintah Amerika Serikat sebagai panduan bagi pemerintah negara-negara lain dalam hal memerangi perdagangan manusia.¹⁸⁴ Hal tersebut juga mencerminkan bagaimana kegigihan pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi perdagangan manusia secara global. Diebutkan pula oleh pemerintah Amerika Serikat bahwa *TIP Report* merupakan suatu sumber yang terpercaya dan komprehensif dalam menilai upaya pemerintah dunia memerangi perdagangan manusia.¹⁸⁵

Bagian yang kedua adalah *International Programs*, dimana sejak tahun 2002 pemerintah Amerika Serikat telah memberikan dana bantuan sebesar lebih dari 250 juta USD dan membiayai lebih dari 880 proyek anti-perdagangan manusia di seluruh dunia.¹⁸⁶ Bagian ini bertugas untuk mengembangkan strategi pemograman daerah tahunan, mengawasi proses hibah kompetitif, memantau proyek yang sedang berjalan, dan memberikan bantuan teknis yang melibatkan organisasi internasional dan NGO.

¹⁸³ Ibid.

¹⁸⁴ Ibid.

¹⁸⁵ Ibid.

¹⁸⁶ Ibid.

Program-program yang dikeluarkan oleh TIP Office dibagi menjadi 4 yaitu *Bilateral and Regional*, *Training and Technical Assistance*, *Emergency Victim Assistance*, dan *Research and Innovation*.¹⁸⁷ Pada *Bilateral and Regional*, program yang diberikan bersifat bilateral atau pun regional dengan jangka waktu tahunan yang mempromosikan anti-perdagangan manusia yang bertujuan melakukan perlindungan, pengusutan dan penghukuman, dan juga pencegahan. Pada bagian kedua *Training and Technical Assistance*, program yang diberikan berupa proyek pelatihan jangka pendek untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan dan masyarakat sipil untuk memerangi perdagangan manusia, dan bantuan teknis *deployable* untuk membantu instansi pemerintah mengatasi kebutuhan yang mendesak.

Pada bagian ketiga yaitu *Emergency Victim Assistance*, program tersebut berupa pemberian bantuan langsung pada korban perdagangan manusia di luar negeri dalam keadaan darurat kasus-per-kasus. Dan bagian terakhir yaitu *Research and Innovation*, dimana pada bagian ini program yang diberikan berupa proyek jangka pendek dan multi-tahunan guna memenuhi kebutuhan penelitian yang belum terpenuhi dan mengeksplorasi pendekatan inovatif guna memerangi perdagangan manusia.

TIP Office pada bagian ketiga yaitu *Public Engagement (PE)* berfungsi sebagai penghubung TIP Office untuk Capitol Hill, memastikan bahwa anggota Kongres dan staf mereka sadar akan tindakan *Departement of States* dalam hal

¹⁸⁷ Ibid.

memerangi perdagangan manusia.¹⁸⁸ Bagian PE juga bertugas untuk mengelola penjangkauan media dari TIP Office dan melaksanakan kampanye publik dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan perdagangan manusia sehingga mendorong publik untuk berperan aktif dalam memerangnya. Selain itu pula, Tim *Multilateral Affair* dalam PE, berfungsi sebagai titik fokus TIP Office pada semua hal yang berkaitan dengan PBB, ILO, *Organization for Security and Cooperation in Europe*, *Organization of American States*, Konferensi Regional tentang Migrasi, dan badan-badan multilateral lainnya.¹⁸⁹

Tim tersebut juga bekerjasama dengan negara-negara anggota lainnya untuk memastikan bahwa resolusi dan inisiatif baru tidak hanya bersifat teguran tapi menghasilkan sesuatu dalam mengatasi perdagangan manusia. Adanya peratifikasian secara universal dan implementasi penuh dari Protokol Parlemo dan promosi pendekatan yang berpusat pada korban yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas semua bentuk perdagangan manusia merupakan *centerpieces* dari upaya anti-trafficking di wilayah multilateral.

Seperti yang sudah di jelaskan diatas bahwa *TIP Office* dibagi menjadi 4 bagian dengan tugas yang berbeda-beda. Dalam hal *management* maka bagian yang cocok dengan upaya pemerintah Amerika Serikat melalui *TIP Office* adalah dengan menjalankan peran kedutaan secara maksimal dibagian *PE (Public Engagement)*. Dalam fungsi bilateral, maka *PE* bertugas untuk mengelola dan melaksanakan kampanye publik guna meningkatkan kesadaran akan perdagangan

¹⁸⁸ Ibid

¹⁸⁹ Ibid.

manusia sehingga mendorong publik untuk berperan aktif dalam memerangnya.

Salah satunya adalah dengan mengadakan seminar bersama YSEALI Thailand.

YSEALI (*Young Southeast Asian Leaders Initiative*) merupakan sebuah program yang dimiliki pemerintah Amerika Serikat yang diluncurkan pada tahun 2013, guna memperkuat pengembangan kepemimpinan dan jaringan di kawasan Asia Tenggara.¹⁹⁰ YSEALI memiliki berbagai program seperti pertukaran budaya, *regional exchanges*, dan pendanaan benih dalam bidang agrikultur. Pada Juni 2016, pemerintah Amerika Serikat mengadakan seminar mengenai *Anti-Human Trafficking* di Bangkok.¹⁹¹

Dalam seminar tersebut pemerintah Amerika Serikat mengundang 34 pemimpin muda dari Malaysia dan Thailand. Seminar tersebut memiliki tujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan untuk menyebarkan informasi tentang kesadaran akan perdagangan manusia dan pencegahan.¹⁹² Dan pada saat yang sama juga, mempromosikan dan menekankan pentingnya peran generasi muda dalam memerangi perdagangan manusia.

Selain itu juga pada 24 Juni 2015, duta U.S-ASEAN Hachigian mengunjungi Bangkok untuk menghadiri *ICT Solutions to Help Combat Human Trafficking Conference* yang mana diselenggarakan oleh Microsoft dan bekerjasama dengan USAID yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah

¹⁹⁰ YSEALI.-.YSEALI diunduh dari <https://th.usembassy.gov/education-culture/yseali/>

¹⁹¹ US Embassy.-.Anti-Human Trafficking Workshop 2016 diunduh dari <https://th.usembassy.gov/anti-human-trafficking-workshop-2016/>

¹⁹² Ibid.

Amerika Serikat.¹⁹³ PBB juga merupakan salah satu partner yang turun menyelenggarakan seminar tersebut. Dalam seminar tersebut pemerintah Amerika Serikat menekankan akan pentingnya memerangi perdagangan manusia dan menunjukkan komitmennya untuk memerangi perdagangan manusia.

Selain itu juga dalam menjalankan tugasnya dalam melaksanakan kampanye dan meningkatkan kesadaran akan perdagangan manusia, kedutaan besar Amerika Serikat di Thailand yang merupakan kepanjangan tangan dari *TIP Office*, melakukan berbagai kegiatan. Pada 6-8 Agustus 2014, tim konsulat jendral Heath mengadakan diskusi dengan pemerintah Thailand di Nan, Phayao, dan provinsi Phrae perihal *trafficking-in-persons*, perdagangan lintas batas, keterlibatan masyarakat sipil dan kebudayaan.¹⁹⁴

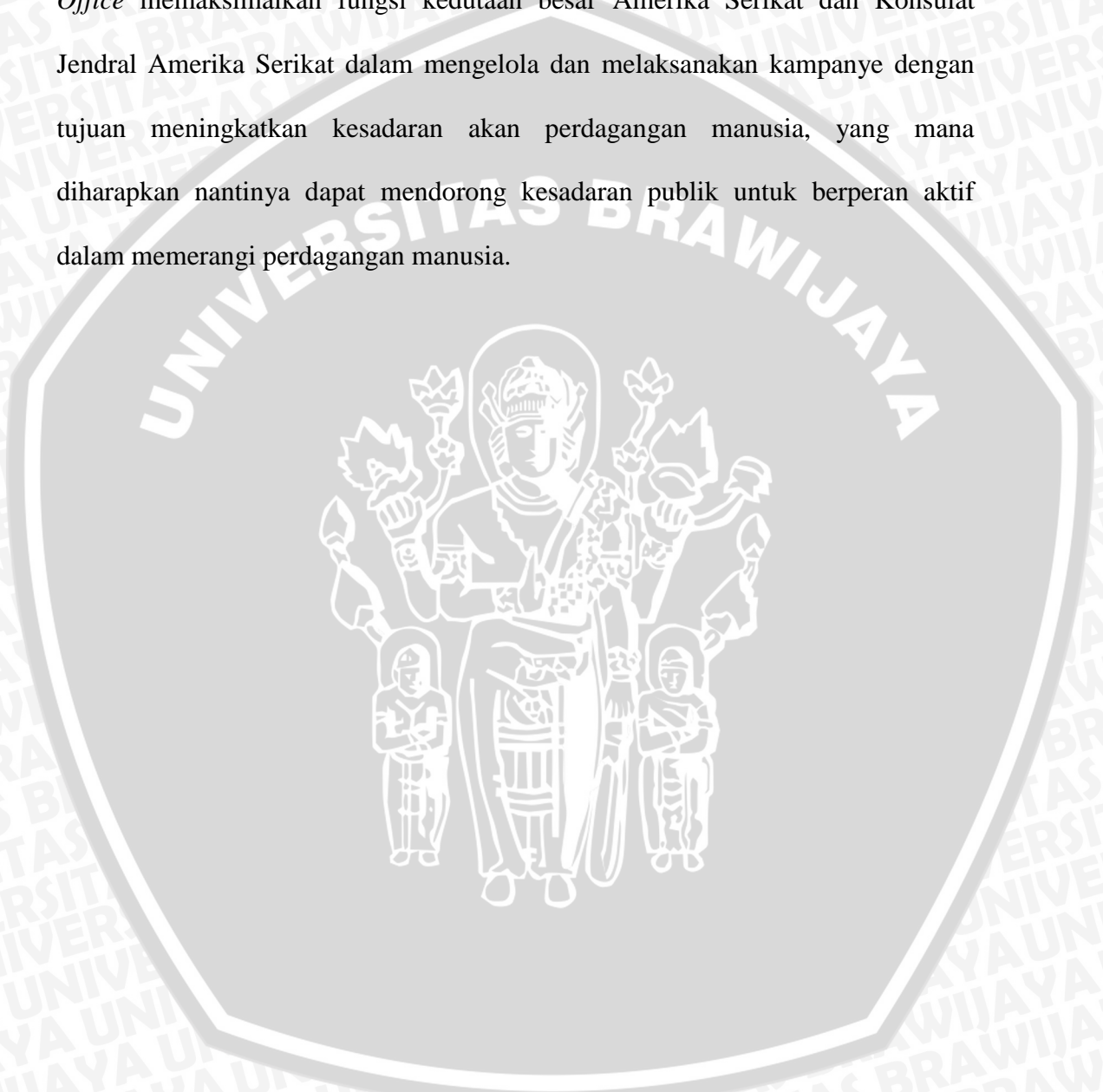
Maka dapat disimpulkan dalam hal ini upaya pemerintah Amerika Serikat dengan memaksimalkan tugas *TIP Office* di Thailand dapat dibagi menjadi 4 bagian, pada bagian pertama *Reports and Political Affairs*, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan *TIP Report* setiap tahunnya yang mana merupakan hasil diskusi dengan pemerintah Thailand, NGO, dan beberapa *ally* yang dimiliki pemerintah Amerika Serikat. Pada bagian yang kedua *International Programs*, pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini di wakili oleh *TIP Office* bekerjasama

¹⁹³ US Embassy.--A *Timeline of Key Events in U.S-Thai Relations* diunduh dari <https://th.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/io/>

¹⁹⁴ U.S Consulate General Chiang Mai Thailand.2014.*Consul General Heath in Phayao, Nan and Phrae (Aug 6-8)* Diunduh dari https://web.facebook.com/pg/chiangmai.usconsulate/photos/?tab=album&album_id=10154479138025274

dengan NGO dalam memberikan program-program yang berupa bantuan dalam memerangi perdagangan manusia.

Dan yang terakhir pada bagian ketiga yaitu *Public Engagement (PE)*, *TIP Office* memaksimalkan fungsi kedutaan besar Amerika Serikat dan Konsulat Jendral Amerika Serikat dalam mengelola dan melaksanakan kampanye dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan perdagangan manusia, yang mana diharapkan nantinya dapat mendorong kesadaran publik untuk berperan aktif dalam memerangi perdagangan manusia.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Berdasarkan bab-bab dan sub-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi perdagangan manusia di Thailand adalah *promoting*, *outreach*, *feedback*, dan *management*.

Dalam *promoting*, pemerintah Amerika Serikat memberikan penawaran kepada Thailand di 3 bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang militer dan bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada bidang ekonomi berupa berbagai bentuk dana bantuan dan dijadikan partner utama dalam bidang *seafood industry*. Pada bidang militer, adanya kerjasama keamanan antara Amerika Serikat dan Thailand. Pada bidang pendidikan dan kebudayaan, adanya berbagai bentuk *cultural exchange* yang dimaksudkan untuk memajukan generasi-generasi muda di Thailand.

Lalu *outreach*, pemerintah Amerika Serikat menggunakan media massa dan NGO sebagai *ally*. Media massa tersebut adalah CNN, New York Times dan The Guardian yang mana melakukan investigasi dengan gencar dan dapat mempengaruhi keputusan Pemerintah Thailand dalam mengambil kebijakan dalam isu perdagangan manusia. Lalu, NGO yang bekerjasama dengan

repository.ub.ac.id

pemerintah Amerika Serikat adalah *Solidarity Center* dan *New Life Center Foundation*, yang mana bertujuan untuk meningkatkan *awereness*, pecegahan dan perlindungan terhadap para korban perdagangan manusia.

Feedback yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat adalah dengan mengeluarkan *TIP Report* setiap tahunnya. Dimana, dalam *TIP Report* tersebut mempengaruhi bagaimana pengambilan kebijakan pemertintah Amerika Serikat kepada Pemerintah Thailand dalam upayanya memerangi perdagangan manusia. Upaya diplomasi yang keempat adalah **management**, dimana pemerintah Amerika Serikat memfokuskan pada peran *TIP Office* di Thailand. Yang mana *TIP Office* bertugas sebagai kantor pusat yang berfungsi untuk mengawasi kedutaan dalam tugasnya dalam hal memerangi perdagangan manusia. Dan dalam memnjalkan tugasnya *TIP Office* menggunakan fungsi ketiga yaitu *Public Engagement (PE)*. *TIP Office* memaksimalkan fungsi kedutaan besar Amerika Serikat dan Konsulat Jendral Amerika Serikat dalam mengelola dan melaksanakan kampanye dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan perdagangan manusia, yang mana diharapkan nantinya dapat mendorong kesadaran publik untuk berperan aktif dalam memerangi perdagangan manusia.

6.2 Saran

Dalam penelitian ini penggunaan alat fungsi bilateral diplomasi akan sangat efektif apabila hanya melihat hubungan bilateral kedua negara, maka ke-lima fungsi tersebut dapat diaplikasikan dengan baik. Maka dari itu penulis

memberikan saran kepada peneliti selanjutnya apabila akan meneliti menggunakan fungsi bilateral diplomasi maka akan lebih baik menguasai konsep tersebut terlebih dahulu. Dan apabila ingin menulis mengenai diplomasi pemerintah Amerika Serikat terhadap Thailand dalam hal perdagangan manusia, maka akan lebih baik jika mengangkat dampak atau motif dari upaya diplomasi tersebut. Karena akan lebih menarik, dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.



Daftar Pustaka

Buku, Jurnal, Report:

Anonymous.2015.*Thailand's Progress Report on Anti-Human Trafficking Efforts*

Anonymous.2015.*National Human Trafficking Resource Center (NTHRC) Data Breakdown*

Anonymous.2015.*Thailand's Progress Report on Anti-Human Trafficking Efforts*

Departement of State, USA.2001.*Trafficking in Person Report 2001*

Departement of State, USA.2010.*Trafficking in Person Report 2010*

Departement of State, USA.2013.*Trafficking in Person Report 2013*

Departement of State, USA.2014.*Trafficking in Person Report 2014*

Departement of State, USA.2015.*Trafficking in Person Report 2015*

Departement of State, USA.2016.*Trafficking in Person Report 2016*

Holmes, Leslie.2010.*Trafficking and Human Rights: European and Asia-Pacific Perspectives*.Cheltenham; Inggris

IOM.2011.*IOM Anual Report 2011 Counter Trafficking*

Keith, Richard dan Hamilton, Langhorn.1995.*The Practice of Diplomacy*.London; Routledge ; dalam R.P Barston.2013.*Modern Diplomacy Forth Edition*.London; Routledge

PBB.2000. *Protocol to Prevent, Supress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, human trafficking*

Polaris.2015.*2015 Statistics*

Barston, R.P.2013.*Modern Diplomacy Forth Edition*.London; Routledge

Rana, Kishan S.2007.*Bilateral Diplomacy*.DiploFoundation; Belgrade

UNODC.2014.*Global Report on Trafficking in Person 2014 (United Nations publication, Sales No. E.14.V.10)*

UNIAP.2015.*Thailand Human Trafficking Datasheet*

Website, Artikel:

AFS.-. *What We Do* diunduh dari <http://afs.org/about-afs/#afs-nav-what-we-do>

AFSthailand.-. *News & Events* diunduh dari <http://www.afsthailand.org/news-and-events>

Anonymous.-. *Why Fight? ... There are 27 Million Reasons!!* Diunduh dari <https://fightslaverynow.org/why-fight-there-are-27-million-reasons/the-law-and-trafficking/trafficking-victim-protection-act/trafficking-victim-protection-act/> pada 29 July 2016

Anonymous.-.- Diunduh dari <http://m.state.gov/mc16465.htm>

Ark of Hope For Children.2016. *Child Trafficking Status: US and International* diunduh dari <http://arkofhopeforchildren.org/child-trafficking/child-trafficking-statistics>

ASPE.2009. *Human Trafficking Into And Within The United States: A Review of The Literature* diunduh dari <https://aspe.hhs.gov/basic-report/human-trafficking-and-within-united-states-review-literature#What>

Associated Press.2015. *Thai officials among more than 100 charged with human trafficking* Diunduh dari <https://www.theguardian.com/world/2015/jul/24/thai-officials-among-more-than-100-charged-with-human-trafficking>

Brown, Sophie.2014. *Tackling Thailand's Human Trafficking Problem* diunduh dari <http://edition.cnn.com/2014/06/20/world/asia/thailand-trafficking-report/>

CIA.-. *The World Factbook* diunduh dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html>

Coorlim, Leif.2014. *U.S.Human Trafficking Report Drops Four Nations to Lowest Tier* diunduh dari <http://edition.cnn.com/2014/06/20/us/human-trafficking-report/index.html>

Corben, Ron.2015. *Thailand: Progress Made in Countering Human Trafficking* diunduh dari <http://www.voanews.com/a/thailand-says-progress-made-in-countering-human-trafficking/2596249.html>

Departement of State, USA.-. *Thailand-US Relations* diunduh dari <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2814.htm>

Departement of States.2014.*Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons: Projects Funded During Fiscal Year 2013* diunduh dari <http://www.state.gov/j/tip/rls/other/2013/215002.htm>

Departement of States.2015.*Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons: Projects Funded During Fiscal Year 2014* diunduh <http://www.state.gov/j/tip/rls/other/2014/233654.htm>

FBI.-*Human Trafficking/Involuntary Servitude* diunduh dari <https://www.fbi.gov/investigate/civil-rights/human-trafficking>

Fullbright Thailand.-*About Us* diunduh dari <http://fulbrightthai.org/history.asp?menu=2>

Hodal, Kate, Annie Kelly, dan Dan Roberts.2014.*US demotes Thailand and Qatar for abysmal human trafficking records* diunduh dari <https://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/20/thailand-qatar-downgraded-human-trafficking-report>

Irvine, Dean, Saima Mohsin, dan Kocha Olarn.2015.*Seafood from slavery: Can Thailand tackle the crisis in its fishing industry?* Diunduh dari <http://edition.cnn.com/2015/05/11/asia/freedom-project-thailand-fishing-slave-ships/>

JUSMAGTHAI.-*What is JUSMAGTHAI?* diunduh dari <http://www.jusmagthai.com/main.html>

Lefevre, Amy Sawitta.2015.*Thailand toughens trafficking law with death penalty, steep fines* Diunduh dari <http://www.reuters.com/article/us-thailand-trafficking-idUSKBN0MM10V20150326>

Moll, David.2014.*U.S.Gives Thailand and Malaysia Lowest Grade on Human Trafficking* diunduh dari https://www.nytimes.com/2014/06/21/world/asia/us-gives-thailand-and-malaysia-lowest-grade-on-human-trafficking.html?_r=1

National Geographic Kids.-*Articles: United States* diunduh dari <http://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/united-states/#united-states-golden-gate-bridge.jpg> pada 28 July 2016

New Life Center Foundation.-*About The New Life Center Foundation* diunduh dari <http://www.newlifecenterfoundation.org/about-new-life-center-foundation.html>

NOAA.-*U.S. IMPORTS OF SHRIMP (ALL TYPES) BY COUNTRY WITH COMPARISONS* diunduh dari

<https://www.st.nmfs.noaa.gov/apex/f?p=169:2:0::NO::>

Peace Corps.-.About diunduh dari <https://www.peacecorps.gov/about/>

Polaris.-*The Facts* diunduh dari <https://polarisproject.org/facts>

Reuters.2016.*US human trafficking report to upgrade Thailand, sources say* diunduh dari <https://www.theguardian.com/global-development/2016/jun/29/us-human-trafficking-in-persons-report-upgrade-thailand-sources-say>

Rogozhina, Natalia.2014.*US Sanctions Against Thailand* diunduh dari <http://www.journal-neo.org/2014/08/29/rus-amerikanskie-sanktsii-teper-i-protiv-tajlanda/>

Solidarity Center.-.Who We Are diunduh dari <http://www.solidaritycenter.org/who-we-are/>

Stoakes, Emanuel dan Chris Kelly.2015.*Revealed: how the Thai fishing industry trafficks, imprisons and enslaves* diunduh dari <https://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/20/thai-fishing-industry-implicated-enslavement-deaths-rohingya>

The Guardian.2016.*Sex-trafficking ring forced hundreds of Thai women to 'live a nightmare' in US* diunduh dari <https://www.theguardian.com/law/2016/oct/05/sex-trafficking-ring-thai-women-us-arrests>

Universities of Oregon State.2014.*Overview of the U.S. Seafood Supply* diunduh dari <http://www.seafoodhealthfacts.org/seafood-choices/overview-us-seafood-supply>

UNODC.2014.*UNODC report on human trafficking exposes modern form of slavery* diunduh dari <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html>

USAID.2016.*U.S. Foreign Aid by Country* diunduh dari https://explorer.usaid.gov/cd/THA?implementing_agency_id=1&measure=Obligations&fiscal_year=2013

Villadiego, Laura.2016.Thailand:Reclaiming Mangroves fo Shrimp Production diunduh dari

<http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/08/thailand-reclaiming-mangroves-shrimp-production-160815131444765.html>

